

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
BAGIAN HUKUM

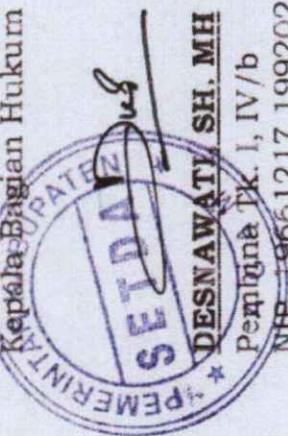
PROGRAM : PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Langkah 1 na Kebijakan/ ran/Kegiatan	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9	PENGUKURAN HASIL.		
									ISU GENDER		KEBUAKAN DAN RENCANA KEDEPAN
Faktor Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base- Line)							
Im : RINTAHAN AHTERAAN AT an : isi dan Inasi Hukum	Data Pembuka Wawasan	Akses : • Target jumlah produk hukum Tahun 2020 sebanyak 620 10 perda, 60 perubub, 550 kepbub Yang terealisasikan • Jumlah Produk Hukum Tahun 2020 sebanyak 559 6 Perda, 65 Perubub, 6 Keppub	ISU GENDER Faktor Kesenjangan Internal Sebab Kesenjangan Eksternal	Kurangnya SDIV dari OPD pemrakasa Produk Hukum yang mengerti tentang Legal Drafting - Adanya kebijakan Pembatasan peserta dalam Harmonisasi Produk Hukum Daerah. Rancangan produk Hukum - Belum ada data terpilih (per sektor, laki-laki, perempuan) dalam daftar hadir rapat Tim. - Beban ganda ASN Partisipasi - Kurangnya pengetahuan tentang legal drafting dari OPD	Terfasilitasinya Penyusunan produk hukum daerah yang harmonis dengan peraturan perundangan- - Meryempurnakan normenklatur kegiatan agar lebih fokus, sehingga menjadi Kegiatan perencanaan, harmonisasi evaluasi, dokumentasi dan penyebarluasan peraturan perundangan- undangan	- memfasilitasi penyusunan kebijakan daerah yang harmonis dengan peraturan perundangan- - undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan responsif gender	- Jumlah Produk Hukum Tahun 2020 sebanyak 559 - Perencanaan kebutuhan peraturan daerah melalui Pembentukan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) dengan pendekatan responsif gender;	- Jumlah Produk Hukum Tahun 2020 sebanyak 559 - Peraturan caerh yang berasal dari Inisiatif Pemerintah Daerah sesuai dengan propemperda.	Output : - Jumlah Produk Hukum Tahun 2020 sebanyak 559 - Jumlah Peraturan Perundangan- undangan yang disusun, jumlah rancangan peraturan caerh yang berasal dari Inisiatif Pemerintah Daerah sesuai dengan propemperda.	PENGUKURAN HASIL.	
ngitan : isi Penyusunan k Hukum		1. 1. TA 2021 Kegiatan Harmonisasi dan pengkajian produk hukum daerah yang direncanakan sebanyak 660 dokumen, 2. Jumlah scim Tim Pengkaji dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah dan pembahas ranperda inisiatif baru jumlah lebih kurang 10 orang yang terdiri dari Unsur pimpinan, Personil Bagian Hukum dan utusan dari OPD Pemrakarsa, laki-laki dan perempuan.		2. - Meningkatnya Jumlah Produk Hukum Daerah yang Responsif Gender hingga 5% Tahun berikutnya.							

Langkah 1 na Kebijakan/ rani/Kegiatan	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
			ISU GENDER		KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Laki-laki 3 Orang Perempuan 6 Orang					<p>terhadap produk hukum daerah agar tidak bertentangan dengan Peraturan perundang- undangan lebih tinggi, dan kepentingan umum, serta mewujudkan produk hukum daerah yang responsif gender dan anak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan koordinasi dengan OPD maupun Instansi Vertikal - Melakukan evaluasi terhadap produk hukum daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang- undangan terbaru, melanggar kepentingan umum serta yang tidak responsif gender dan anak; - Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang- 			

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
objekkan/ Kegiatan	ISU GENDER		KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN			PENGUKURAN HASIL		
	Data Pembuka Wiwassen	Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
						undangan pada masyarakat maupun ASN.		

Lubuk Besung, 1 April 2021
 Kepala Bagian Hukum



*
 Pejabat Tk. I, IV/b
 NIP. 19661217 199202 2 001

FORM PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (PAG/GBS)

SKPD : BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

NO	ASPEK	URAIAN
1.	PROGRAM	PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	KEGIATAN	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
2.	Kode Program	4.01.02
3.		<p>1. DATA PEMBUKA WAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Target jumlah produk hukum Tahun 2020 sebanyak 620 - Perda, 60 perbub, 550 kepbub <p><u>Yang terealisasikan</u></p> <p>Jumlah Produk Hukum Tahun 2020 sebanyak 559, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 6 Perda, 2. 65 Perbub, 3. 488 Kepbub <ul style="list-style-type: none"> - TA 2021 Kegiatan Harmonisasi dan pengkajian produk hukum daerah yang direncanakan sebanyak 660 dokumen, - Jumlah sdm Tim Pengkaji dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah dan pembahas ranperda inisiatif berjumlah lebih kurang 10 orang yang terdiri dari Unsur pimpinan, Personil Bagian Hukum dan utusan dari OPD Pemrakarsa, laki-laki dan perempuan. <p>Laki-laki 3 Orang Perempuan 6 Orang</p> <p>2. ISU DAN FAKTOR KESENJANGAN GENDER</p> <p>a. <u>Faktor Kesenjangan</u></p> <p>Akses :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peserta rapat yang hadir tidak/kurang memahami Rancangan Produk Hukum - Beban ganda ASN <p>Partisipasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pengetahuan tentang legal drafting dari OPD - Manfaat Pengalaman dalam rapat pembahasan dan pengkajian produk hukum daerah dimaksud masih belum terlalu dirasakan manfaatnya oleh staf untuk pengembangan pengetahuannya terkait penyusunan produk hukum daerah

		<ul style="list-style-type: none"> • <u>Penyebab Internal</u> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya kebijakan Pembatasan peserta dalam Harmonisasi Produk Hukum Daerah. - Belum ada data terpisah (per sektor, laki-laki, perempuan) dalam daftar hadir rapat Tim. • <u>Penyebab Eksternal</u> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya SDM dari OPD pemrakasa Produk Hukum yang mengerti tentang Legal Drafting
4.	Capaian Program	<p>Tolak Ukur : terfasilitasinya Penyusunan produk hukum daerah yang harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan responsif gender.</p> <p>Indikator dan Target Kinerja :</p> <p>Output :</p> <p>660, 10buah Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang disusun, Jumlah rancangan peraturan daerah yang berasal dari inisiatif Pemerintah Daerah sesuai dengan propemperda.</p> <p>Anggaran: Rp.558.970.000</p> <p>Outcome:</p> <p>Meningkatnya Jumlah Produk Hukum Daerah yang Responsif Gender hingga 5% Tahun berikutnya.</p>
5.	Jumlah Anggaran Program	DPA TA 2021 Rp558.970.000 (lima ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)
6.	KEGIATAN	<ul style="list-style-type: none"> -Memfasilitasi penyusunan kebijakan daerah - Menyempurnakan nomenklatur kegiatan agar lebih fokus, sehingga menjadi Kegiatan Perencanaan, harmonisasi evaluasi, dokumentasi dan penyebarluasan peraturan perundang- undangan - Perencanaan kebutuhan peraturan daerah melalui Pembentukan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) dengan pendekatan responsif gender; - Melaksanakan pengkajian dan harmonisasi terhadap produk hukum daerah agar tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan lebih tinggi, dan kepentingan umum, serta mewujudkan produk hukum daerah yang responsif gender dan anak

		<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan koordinasi dengan OPD maupun Instansi Vertikal - Melakukan evaluasi terhadap produk hukum daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang- undangan terbaru, melanggar kepentingan umum serta yang tidak responsif gender dan anak; - Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan pada masyarakat maupun ASN.
--	--	---



MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
TAHUN 2022

: BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
: PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

RAM Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan Langkah 3	KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN			Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
			Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6			
Im : Inomian dan Inginuan Jan : an Administrasi nginuan eglatan: igendalian dan Evaluasi gram Pembangunan gelolaan Evaluasi dan aporan Pelaksanaan ntangunan	- Jumlah OPD yang dimonitoring di Kabupaten Agam adalah : 52 OPD yang terdiri dari Kepala OPD laki-laki 44 orang dan perempuan 8 orang	Akses : - Sebagian besar kepala OPD serta Tim Monitoring dan evaluasi, adalah laki-laki. Partisipasi : - Peran perempuan dalam monitoring dan evaluasi masih rendah	- Keterbatasan SDM perempuan - Kurangnya dukungan sarana dan prasarana	- Keterbatasan kualitas SDM Perempuan di Kabupaten Agam - Faktor budaya di masyarakat	- Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Base Data (Base Line)	Langkah 4
n : judya Layanan ndidikan Administrasi ngunuan yang alitas dalam Upaya apalan Percepatan nginuan	- Jumlah OPD yang dimonitoring di Kabupaten Agam adalah : 52 OPD yang terdiri dari Kepala OPD laki-laki 44 orang dan perempuan 8 orang	- Jumlah personil yang melaksanakan kegiatan monitoring sebanyak 8 orang yang kesemuanya laki-laki.	- SOP belum efektif - Belum optimalknya sistem informasi pengendalian berbasis internet	- Keterbatasan kelebihan terhadap pengolahan data di internal OPD	- Meningkatkan efisiensi evaluasi dan pelaporan program/ kegiatan dan tersedianya pelaporan	- Melakukan sosialisasi dan advocacy terhadap OPD mengenai pengendalian program/kegiatan Bimtek tentang pengendalian program/kegiatan	Output : - Jumlah OPD yang dimonitoring di Kabupaten Agam adalah 52 OPD yang terdiri dari kepala OPD laki-laki 44 orang dan perempuan 8 orang	Base Data (Base Line)

Lubuk Basung,
Maret 2021
KEPALA BAGIAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Usman SKM MM

Pembina Tk. I

NIP. 19640213 198903 1 007

GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
TAHUN 2022

Nama OPD : SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi : BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Program	Perekonomian dan Pembangunan	
Kegiatan	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	
Sub kegiatan	1. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 2. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	
Kode Rekening	4.01.03.2.02	
Analisis Situasi	1. Jumlah OPD yang dimonitoring di Kabupaten Agam adalah : 52 OPD yang terdiri dari kepala OPD: - laki-laki 44 orang - perempuan 8 orang. 2. Jumlah personil yang melaksanakan kegiatan monitoring sebanyak 8 orang yang kesemuanya laki-laki.,	
Perencanaan Kegiatan	1. Melakukan sosialisasi dan advocacy terhadap OPD mengenai pengendalian program/kegiatan 2. Bintek tentang pengendalian program/kegiatan 3. Membangun sistem informasi pengendalian berbasis internet secara berkelanjutan.	
	Indikator input	Percentase jumlah SDM perempuan yang melaksanakan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dalam pengendalian program/kegiatan
	Indikator output	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program/Kegiatan OPD
Anggaran Kegiatan	Rp. 792.475.550,-	
Indikator Outcome atau dampak/hasil secara luas	Percentase pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku	

Lubuk Basung, Maret 2021

KEPALA BAGIAN

ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

USMAN SKM, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19640213 198903 1 007



MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN AGAM

PROGRAM : Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

KEGIATAN : Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

SUB KEGIATAN : Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9	PENGUKURAN HASIL		
									ISU GENDER	KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN	Basis Data (Base-Line)
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi			Indikator Kinerja		
Program : Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Data Pembuka Wawasan Berdasarkan data Statistik Penduduk Laki laki Kabupaten Agam 236.418.000 Orang dan perempuan 244.304.000. Rumah Tangga Miskin 43.897 K.K.	- Penghasilan Guru TPA Belum Mencukupi	- Belum semua Guru TPA yang mengikuti Pelatihan	- Jumlah TPA yang tersebar di seluruh Kecamatan Nilai nominal/Gaji yang masih rendah, sehingga kepala keluarga/Laki -laki lebih memilih mencari pekerjaan yang Upah/gajinya lebih memadai.	- Meningkatkan kesejahteraan Guru TPA	- Meningkatkan kesejahteraan Guru TPA	- Meningkatkan SDM Guru TPA/MDA	- Mengusulkan penambahan Anggaran bantuan untuk Guru TPA/MDA	- Koordinasi dengan dinas terkait dalam hal pengelolaan.	Output : Terselesaiggaranya Bantuan Jasa Guru TPA	
Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan Guru TPA	Jumlah Guru TPA di Kab.Agam 3500 (Laki-laki 75% & Perempuan 25%)	- Pengelolaan yg masih belum maksimal/profesional	- Masih Rendahnya Bantuan untuk Guru TPA/MDA. Waktu pelaksanaan hanya satu kali pemberian.						Outcome : Terlaksananya Proses belajar mengajar di TPA dengan Baik.	INPAC : Menlingkatnya kesejahteraan Guru TPA.	

PEMERINTAH KABUPATEN

Kepala Kabupaten Kesra

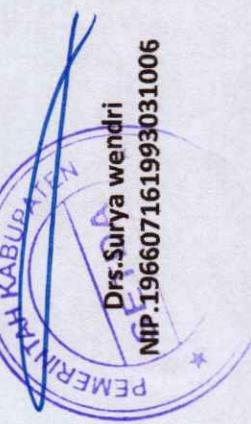


		PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)	
SKPD TAHUN ANGGARAN	PROGRAM	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Agam 2022	
KODE PROGRAM	KEGIATAN SUB KEGIATAN	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
ANALISIS SITUASI			
		<p>4.01.02.2.02</p> <p>Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual.</p>	<p>Data Pembuka Wawasan</p> <p>Berdasarkan data Statistik Penduduk Laki laki Kabupaten Agam 236.418.000 orang dan perempuan 244.304.000.Rumah Tangga Miskin 43.897 KK.</p> <p>Jumlah Guru TPA di Kab.Agam 3500 (Laki-laki 75% & Perempuan 25%)</p> <p>Masih Rendahnya Bantuan untuk Guru TPA/MDA.</p> <p>Waktu pelaksanaan hanya satu kali pemberian.</p> <p>Faktor penyebab kesenjangan internal dan eksternal</p> <p><u>Sebab kesenjangan internal :</u></p> <p>Belum semua Guru TPA yang mengikuti Pelatihan</p> <p>Tenaga di Bagian Kesra yang masih terbatas untuk melakukan Verifikasi data ke TPA/MDA</p> <p>Monitoring & Evaluasi Masih belum maksimal</p> <p><u>Sebab kesenjangan eksternal :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah TPA yang tersebar di seluruh Kecamatan. - Nilai nominal/Gaji yang masih rendah, sehingga kepala keluarga (Laki-laki) lebih memilih mencari pekerjaan yang Upah/gajinya lebih memadai. - Koordinasi dengan Dinas terkait masih kurang.
	TUJUAN		Meningkatkan kesejahteraan Guru TPA

RENCANA AKSI	Aktivitas	1.Meningkatkan SDM Guru TPA/MDA	
	1	Tujuan	Meningkatkan kesejahteraan Guru TPA/MDA.
		Langkah Kegiatan	Mengadakan pelatihan bagi Guru TPA/MDA
			1. Mengusulkan Penambahan Anggaran bantuan untuk guru TPA/MDA. 2. Koordinasi dengan Dinas terkait dalam hal pengelolaan.
Aktivitas	2	Tujuan	Meningkatkan Kesejahteraan Guru TPA/MDA.
		Langkah Kegiatan	Membuat perambahan usulan Anggaran melalui tim Anggaran
CAPAIAN PROGRAM (di level kegiatan)			Perlunya sosialisasi tugas, dan wewenang kegiatan dengan Kemenag Agam, Camat, Nagari.
TOTAL ANGGARAN SUB KEGIATAN			Cakupan pembinaan baca tulis Al-Quran,Jumlah pemuka Agama yang memiliki Kompetensi di Bidang kegamaan,Persentase lembaga pengelolaan zakat dengan manajemen yang baik, persentase peningkatan aktifitas Islamic Center.
			Rp. 3.500.000.000,-

Lubuk basung, 31-03-2021

Kepala Kabagian Kesra



Drs. Surya Wendri
NIP. 196607161993031006

FORMAT GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN AGAM

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender						
Kegiatan : Perumusan kebijakan teknis dan pemantauan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi, fasilitasi kelenjangan pemerintahan, perwakilan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik	Faktor Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan Rencana Aksi	Data Dasar (Base-line)	Pengukuran Hasil		



Sub Kegiatan :
 Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah.

FORM PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (PAG/GBS) TAHUN 2022
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN AGAM

NO	ASPEK	URAIAN	
1	Program	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
	Kegiatan	Kegiatan : Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik	
	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan : Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah.	
2	Indikator kinerja kegiatan	Meningkatnya Pengetahuan Parpol, LSM, Ormas dan OKP terhadap Peraturan Perundang-undangan	
3	Tujuan kegiatan	Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat tentang Demokrasi dan Pemahaman cara berorganisasi	
4	Kode Rekening Kegiatan		
5	Analisa situasi	Minimnya perwakilan perempuan dalam berpolitik, minimnya pengetahuan SDM tentang PUG, dan Terbatasnya Anggaran dalam pelaksanaan kegiatan, hal ini dipengaruhi Faktor Budaya, Ekonomi, Keluarga dan Sistem multi parti itu sendiri.	
6	Rencana Aksi	Aktivitas 1	Memuat informasi mengenai : Sosialisasi dengan sasaran GOW, Kader Perempuan di Parpol. 2. Maksud / Tujuan memberikan pemahaman bagi perempuan pentingnya peran perempuan dalam berpolitik dan berorganisasi
		Aktivitas 2	Diklat Pendidikan Politik Kader Perempuan. Memberikan pengatahan politik untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam berpolitik
		Aktivitas 3	Diklat dasar kepemimpinan Organisasi Meningkatkan pengetahuan perempuan tentang dasar-dasar kepemimpinan organisasi
7	Alokasi Anggaran		
	Output Kegiatan	Jumlah Perempuan yang mendapatkan Sosialisasi , pendidikan (50) orang	
8	Dampak/hasil Output Kegiatan	Meningkatkannya Keterwakilan Perempuan dalam berpolitik dan berorganisasi.	



MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD PROGRAM	BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA SETDA AGAM : PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR						
	Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan			ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN
	Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base- Line)	Indikator Kinerja
Program : Perekonomian dan Pembangunan	Informasi terkait kegiatan - SDM yang ada di Bag PBJ/Sekrt. UKPBJ sebanyak 16 orang, terdiri dari: PNS = 11 Orang CPNS = 5 Orang • Laki-Laki: 8 orang • Perempuan 8 org	Akses : - Sulitnya untuk mendapat sertifikasi bagi ASN	Rawan intervensi dan pengaduan ke APH dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa	Terwujudnya pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan	- Facilitasi ASN untuk Bimtek/Diklat/ Ujian Sertifikasi pengadaan barang/jasa	- Jumlah pengadaan barang/jasa tahun 2021= 42 paket pekerjaan	Output : - Rencana Anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp. 110.000.000 - Fasilitasi pengadaan barang/jasa
Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Masih Kurangan Pejabat Fungsional	- Terbatasnya waktu yang diberikan LKPP untuk dapat mengikuti ujian sertifikasi	- Masih Kurang minat ASN untuk menjadi pejabat fungsional	- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa	Outcome: Meningkatnya percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa		
Sub. Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang- undangan	- Jumlah ASN pejabat fungsional Pengadaan Anggota Kelompok Kerja (Pokja) yang ada: 5 orang sudah dilantik • Laki-Laki: 2 orang • Perempuan: 3 org 5 orang baru lulus ujian sertifikasi	- Mengikuti ujian sertifikasi	- Memfasilitasi ASN mengikuti ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa	- Anggaran kurang maksimal untuk mendukung kegiatan ujian sertifikasi Pengadaan Barang/ Jasa			
Tujuan : Terwujudnya Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan	- Pejabat fungsional Pengadaan Barang/ Jasa Kelompok Kerja (Pokja) yang seharusnya berjumlah maksimal 25 orang	- Masih dibutuhkan pejabat fungsional pengadaan Barang/ Jasa 13 orang lagi					

Lubuk Basung, Maret 2021
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa,



NIP. 19710224 2000003 1 002

Lampiran 4**GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)**

Nama SKPD : BAGIAN PENGADAAN BARANG/ JASA
 Unit Organisasi : SEKRETARIAT DAERAH

Program	PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
Kegiatan	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA
Sub kegiatan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Analisis Situasi	<p>Informasi terkait kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - SDM yang ada di Bag. PBJ/Sekrt. UKPBJ sebanyak 16 orang, terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> PNS = 11 Orang CPNS = 5 Orang • Laki-laki: 8 orang • Perempuan 8 org - Jumlah ASN pejabat fungsional Pengadaan Anggota Kelompok Kerja (Pokja) yang ada: 5 orang sudah dilantik <ul style="list-style-type: none"> • Laki-laki: 2 orang • Perempuan: 3 org 5 orang baru lulus ujian sertifikasi - Pejabat fungsional Pengadaan Barang/ Jasa Kelompok Kerja (Pokja) yang seharusnya berjumlah maksimal 25 orang - Masih dibutuhkan pejabat fungsional pengadaan Barang/ Jasa 13 orang lagi - Honor Pokja <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa: <ul style="list-style-type: none"> • Rp.200 Juta s/d 2.5 M Orang/Paket : Rp. 500.000- • Rp 2,5 M Orang/paket Rp 750.000- 2. Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) <ul style="list-style-type: none"> • Rp. 200 Juta s/d 500 Juta Orang/paket : Rp. 650.000- • Rp 500 Juta s/d 1 Milyar Orang/paket Rp 700.000- • Rp 1 Milyar s/d 2,5 Milyar Orang/paket Rp 750.000- • Rp 2,5 Milyar s/d 5 Milyar Orang/paket Rp 800.000- • Rp 5 Milyar s/d 10 Milyar Orang/paket Rp 850.000- • Rp. 10 Milyar s/d 25 Milyar Orang/paket Rp 900.000- • Di atas 25 Milyar Orang/paket Rp 950.000- 3. Pengadaan Barang/Jasa untuk pengadaan Barang (Non Konstruksi) <ul style="list-style-type: none"> • Nilai Pagu pengadaan diatas 200 Juta s/d 500 Juta Orang/paket Rp. 700.000- • Nilai Pagu pengadaan diatas 500 Juta s/d 1 Milyar Orang/paket Rp. 750.000- • Nilai Pagu pengadaan diatas 1 Milyar s/d 2,5 Milyar Orang/paket Rp. 800.000- • Nilai Pagu pengadaan diatas 2,5 Milyar s/d 5 Milyar Orang/paket Rp. 850.000- • Nilai Pagu pengadaan diatas 5 Milyar s/d 10 Milyar Orang/paket Rp. 900.000- • Nilai Pagu pengadaan diatas 10 Milyar s/d 25 Milyar Orang/paket Rp. 950.000-

		<ul style="list-style-type: none"> • Nilai Pagu pengadaan diatas 25 Miliar Orang/paket Rp. 1.000.000- <p>4. Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi / Jasa lainnya (Non Konstruksi)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai Pagu pengadaan diatas 200 Juta s/d 500 Juta Orang/paket Rp. 500.000- • Nilai Pagu pengadaan diatas 500 Juta s/d 1 Miliar Orang/paket Rp. 525.000- • Nilai Pagu pengadaan diatas 1 Miliar s/d 2,5 Miliar Orang/paket Rp. 550.000- • Nilai Pagu pengadaan diatas 2,5 Miliar s/d 5 Miliar Orang/paket Rp. 575.000- • Nilai Pagu pengadaan diatas 5 Miliar s/d 10 Miliar Orang/paket Rp. 600.000- • Nilai Pagu pengadaan diatas 10 Miliar s/d 25 Miliar Orang/paket Rp. 625.000- • Nilai Pagu pengadaan diatas 25 Miliar Orang/paket Rp. 650.000- <p>- Sarana dan prasarana yang ada:</p> <table border="0"> <tbody> <tr><td>5. Meja</td><td>12 unit</td></tr> <tr><td>6. Kursi</td><td>24 unit</td></tr> <tr><td>7. Komputer</td><td>8 unit</td></tr> <tr><td>8. Laptop</td><td>7 unit</td></tr> <tr><td>9. Printer</td><td>4 unit</td></tr> <tr><td>10. Proyektor</td><td>3 unit</td></tr> <tr><td>11. UPS</td><td>2 unit</td></tr> <tr><td>12. Wifi</td><td>2 (Intranet)</td></tr> </tbody> </table> <p>- Intensitas kerja di UKPBJ cukup tinggi dari Pagi sampai malam.</p> <p>- Jumlah pengadaan barang/jasa tahun 2021: 42 paket pekerjaan</p> <p>- Nilai pagu tender :Rp.76.975.881.086,- (seluruh tender yang telah diproses)</p> <p>- Yang sdh diproses 19 paket dari 42 Dengan nilai kontrak Rp 51.559.101.872,-</p>	5. Meja	12 unit	6. Kursi	24 unit	7. Komputer	8 unit	8. Laptop	7 unit	9. Printer	4 unit	10. Proyektor	3 unit	11. UPS	2 unit	12. Wifi	2 (Intranet)
5. Meja	12 unit																	
6. Kursi	24 unit																	
7. Komputer	8 unit																	
8. Laptop	7 unit																	
9. Printer	4 unit																	
10. Proyektor	3 unit																	
11. UPS	2 unit																	
12. Wifi	2 (Intranet)																	
Perencanaan Kegiatan		Fasilitasi ASN untuk Bimtek/Diklat/Ujian Sertifikasi pengadaan barang/jasa																
	Indikator input	Terfasilitasi ASN untuk Bimtek/Diklat/Ujian Sertifikasi pengadaan barang/jasa, baik laki-laki maupun perempuan.																
	Indikator output	Termotifkasinya pejabat fungsional pengadaan barang/jasa, Baik Laki-laki maupun perempuan.																
		Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa.																
	Indikator input	Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa.																
	Indikator output	Tertanganinya masalah pelaksanaan pengadaan barang/jasa, baik yg dialami perempuan maupun laki-laki																
Anggaran Kegiatan		Rp. 110.000.000,-																

Indikator Outcome atau dampak/hasil secara luas		Meningkatnya percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa
---	--	---

LubukBasung, Maret 2021
Kepala Bagian Pengadaan Barang/ Jasa,



ZUFREN, SP.

NIP. 19710224 200003 1 002

OPD : BADAN KEUANGAN DAERAH
Kabupaten Agam

GAP (Gender Analysis Pathway)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
PROGRAM :	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	Isu Gender	Kebijakan dan Rencana KeDepan	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-line)	Indikator Gender
KEGIATAN: Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah SUB KEGIATAN: Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Out Put : Terlatihnya Pengelola Keuangan	Akses • Pencapaian Peserta Bimtek sebanyak 43 orang dengan peserta perempuan sebanyak 34 Orang dan 9 Orang laki-laki.Pengelola Keuangan pada masing-masing OPD masih didominasi perempuan. Partisipasi • Sarana Komputer untuk menjalankan aplikasi pengelolaan keuangan	Akses • Terbatasnya Jumlah tenaga karena kurangnya SDM Partisipasi • Masih sedikitnya jumlah Pengelola Keuangan berjenis kelamin laki-laki karena perempuan lebih teliti dari laki-laki	Sebab Kesenjangan Internal ▪ Jaringan yang terkadang bermasalah sehingga aplikasi pengelolaan keuangan tidak lancar ▪ Terbatasnya komputer dalam pengelolaan keuangan ▪ Pemahaman terhadap Pengelola Keuangan masih rendah	Peningkatan Ketampilan dan Pemahaman Pengelola Keuangan Daerah pada seluruh OPD se Kab.Agam Kontrol ▪ Adanya anggapan bahwa laki-laki tidak cocok dalam pengelolaan keuangan	Mengiventarisasi pengelola keuangan di OPD ▪ Melaksanakan Bimtek terhadap Pengelola Keuangan pada 34 Orang dan 9 Orang laki-laki.Pengelola Keuangan pada masing-masing OPD masih didominasi perempuan.	Output : • Mengidentifikasi peserta Bimtek sebanyak 43 orang dengan peserta perempuan sebanyak 34 Orang dan 9 Orang laki-laki.Pengelola Keuangan pada masing-masing OPD masih didominasi perempuan.	Output : • Meningkatnya kompetensi Pengelola keuangan di OPD Petugas pengelola keuangan mampu menjalankan aplikasi keuangan	Output : Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel
TUJUAN: Peningkatan Pemahaman dan Kinerja Pengelola Keuangan pada OPD Kab.Agam	Manfaat Bimbingan teknis ini bertujuan agar Terlathinya Pengelola Keuangan disetiap OPD dalam Tata Kelola Keuangan Daerah							



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Sudirman No. 1 Lubuk Basung Telp. (0752) 76306, 877393 Fax 76310
www.agamkab.go.id

GENDER BUDGET STATEMENT

(PERNYATAAN ANGGARAN GENDER)

OPD	: BADAN KEUANGAN DAERAH
T.A	: 2021
PROGAM	: Program Pengelolaan Keuangan Daerah
KEGIATAN	: Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
SUB KEGIATAN	: Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
KODE REKENING	: 5.02.02.2.05.03
ANALISIS SITUASI	: Undang-undang Pengelolaan Keuangan Daerah 1. PP nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) 1. Data Pembuka Wawasan <ul style="list-style-type: none">• Pencapaian Peserta Bimtek sebanyak 43 orang dengan peserta perempuan sebanyak 34 Orang dan 9 Orang laki-laki. Pengelola Keuangan pada masing-masing OPD masih didominasi perempuan.• Sarana Komputer untuk menjalankan aplikasi pengelola keuangan sebanyak 5 unit 2. Issu dan Faktor Kesenjangan Gender <u>Akses:</u> Peserta yang diundang dalam kegiatan Bimtek Pengelola Keuangan Daerah adalah Pengelola Keuangan pada masing – masing OPD

<p><u>Partisipasi</u> Masih sedikitnya jumlah Pengelola Keuangan laki – laki karena perempuan lebih teliti dari laki-laki</p> <p><u>Manfaat</u> Bimbingan teknis ini bertujuan agar Terlatihnya Pengelola Keuangan disetiap OPD dalam Tata Kelola Keuangan Daerah</p> <p>Penyebab Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terbatasnya jumlah Pengelola Keuangan karena kurangnya SDM ▪ Terbatasnya komputer dalam pengelolaan keuangan ▪ Pemahaman terhadap Pengelolaan keuangan masih rendah <p>Penyebab Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jaringan yang terkadang bermasalah sehingga aplikasi pengelolaan keuangan tidak lancar ▪ Tenaga pengelolaan keuangan dari OPD tidak disiplin ▪ Adanya anggapan bahwa laki-laki tidak cocok dalam pengelolaan keuangan
--

RENCANA TINDAK	Sub Kegiatan	Tujuan	Mendapatkan informasi pengelola keuangan pada OPD
		Aktifitas 1	Mengiventarisasi pengelola keuangan di OPD
		Aktifitas 2	▪ Melaksanakan Bimtek terhadap Pengelola Keuangan
		Aktifitas 3	▪ Melakukan monitoring dan evaluasi
		Sumber Daya/ Input	Tenaga yang melakukan pelayanan sebanyak 5 orang (perempuan 4 orang dan laki-laki 1 orang).
		Out Put	<p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kompetensi Pengelola keuangan di OPD 2. Petugas pengelola keuangan mampu menjalankan aplikasi keuangan e-budgeting
ALOKASI SUMBER DAYA	Anggaran	Rp. 440.876.600	
	SDM	Tenaga yang melakukan pelayanan sebanyak 5 orang (perempuan 1 orang dan laki-laki 4 orang)	
DAMPAK/HASIL/MANFAAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kompetensi Pengelola keuangan di OPD 2. Petugas pengelola keuangan mampu menjalankan aplikasi keuangan e-budgeting 3. Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel 		

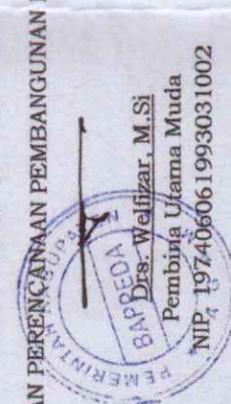


**FORMAT GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
BAPPEDA KABUPATEN AGAM**

	Kanduang 100 % perempuan, PKK dan Darmawantia 100 % perempuan, UPT dikecamatanata 60 % Laki-laki dan 40 % wanita. Forum Anak dan Perempuan 2. Dalam pelaksanaan musrenbang jumlah partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat, laki-laki sebesar 70 % perempuan 30%	banyak menyampai kan aspirasinya daripada peserta perempuan	pembangunan adalah pemenuhan infrastruktur dan recovery ekonomi	4. Manfaat : Pembahasan lebih terfokus kepada infrastruktur dan recovery ekonomi	dan 35 % perempuan.
					KAN 100% laki2, Bundo Kanduang 100 % perempuan, PKK dan Darmawantia 100 % perempuan,

Lubuk Basung, 31 Maret 2021

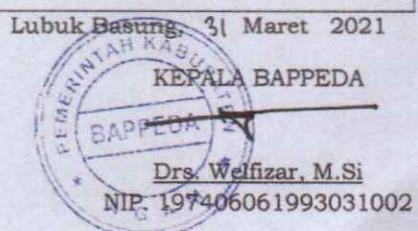
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



FORM KAK/TOR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Program		Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Sasaran Program		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dokumen Perencanaan
Kegiatan		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
Sub Kegiatan		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
Latar Belakang	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah daerah; Peraturan Daerah Kab. Agam No. 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Agam (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2005 Nomor 11); Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kapubaten Agam Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

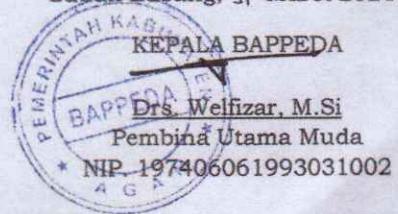
		Agam Nomor 11); 8. Peraturan Daerah Kab. Agam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Agam Tahun Anggaran 2021;
	Gambaran Umum	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan Tahunan Kab. Agam sebagai dasar penyusunan Anggaran Tahun 2022 dalam bentuk dokumen RKPD 2022
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Penyusunan RKPD Kab. Agam melalui tahapan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten
	Indikator Kinerja	1. Output: Terselenggaranya tahapan Musrenbang kabupaten 2. Outcome Tersedianya pedoman perencanaan tahunan daerah
	Batasan Kegiatan	Terselenggaranya tahapan proses penyusunan rencana daerah mulai dari fasilitasi Musrenbang Kabupaten dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah.
Maksud dan Tujuan		1. Maksud : Mengakomodir proses perencanaan pembangunan daerah secara pastisipatif, top down, bottom up dan teknokratif sesuai dengan sistem perencanaan Nasional 2. Tujuan : terselenggaranya proses perencanaan dan penganggaran pembangunan tahunan daerah yang diwujudkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran 2022
Cara Pelaksanaan Kegiatan		1. Dilakukan secara swakelola oleh Bappeda 2. Tahapan dan waktu 3. Pelaksanaan Kegiatan 4. Monitoring dan Evaluasi
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Kabupaten Agam
Pelaksana& Penanggungjawab Kegiatan		1. Kepala Bappeda 2. OPD 3. Kecamatan dan Nagari
Jadwal		Februari – Maret 2021
Biaya		Rp. 60.119.000,-



FORM PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (PAG/GBS)
BAPPEDA KABUPATEN AGAM

NO	ASPEK	URAIAN	
1	Program : Kegiatan : Sub Kegiatan :	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	
2	Indikator kinerja Sub kegiatan	1. Jumlah kegiatan musrenbang yang di fasilitasi	
3	Tujuan Sub kegiatan	Tersedianya pedoman perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah	
4	Kode Rekening Kegiatan	5.01.02.2.01.05	
5	Analisa situasi	1. Peserta dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah adalah: 82 wali nagari, 81 laki-laki, 1 perempuan. 16 camat, 15 laki-laki dan 1 perempuan. Anggota DPRD 39 Orang laki – laki dan 4 orang perempuan Tenaga perencanaan di Bappeda 12 laki-laki dan 21 perempuan. OPD terkait sekitar 65% laki-laki dan 35 % perempuan. KAN 100% laki2, Bundo Kanduang 100 % perempuan, PKK dan Darmawaniita 100 % perempuan, UPT dikecamatan 60 % Laki-laki dan 40 % wanita, dan Forum Anak 2. 3. Dalam pelaksanaan musrenbang jumlah partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi laki-laki sebesar 70 % perempuan 30%	
6	Rencana Aksi	Aktivitas 1 1. Melaksanakan kegiatan musrenbang yang lebih responsif gender 2. Melakukan advokasi kepada pimpinan daerah terkait dengan aspirasi permasalahan dan kebutuhan masyarakat yang responsif gender	Memuat informasi mengenai : Output: Terhimpunnya usulan dari masyarakat berupa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang responsif Gender Outcome : tersusunnya RKPD yang responsif Gender melalui tahapan musrenbang
	Alokasi Anggaran Output Kegiatan		Rp. 60.119.000,-
8	Dampak/hasil Output Kegiatan		Perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi, permasalahan dan kebutuhan gender

Lubuk Basung, 31 Maret 2021



**FORMAT GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN AGAM TAHUN 2022**

yang sudah terbentuk di Kabupaten Agam sebanyak 40 KSB	perempuan		melaksanakan pekerjaan PB
- Jumlah Anggota KSB seluruhnya sebanyak 895,		- Sulitnya merubah tradisi masyarakat lokal	
- Wanita 19,11%			
-Laki-lai 80,89%			



Lubuk Basung, 30 Maret 2021

Kepala Pelaksana

MHD LUTFIAR, SH, M.Si
NIP. 19730313 199703 1 005

FORM PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (PAG/GBS)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN AGAM TAHUN 2022

NO	ASPEK	URAIAN	
1	Program : Kegiatan : Sub Kegiatan :	Penanggulangan bencana Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	
2	Indikator kinerja kegiatan	1). Terlaksananya pembentukan dan pembinaan KSB di Nagari, 2). Terlaksananya operasional TRC	
3	Tujuan kegiatan	Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana	
4	Kode Rekening Kegiatan	1.05.03.2.02.02	
5	Analisa situasi	<p>Data Pembuka Wawasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah KSB yang sudah terbentuk di Kabupaten Agam sebanyak 40 KSB - Jumlah Anggota KSB seluruhnya sebanyak 895 orang, - Wanita 19,11% (171 orang) - Laki-laki 80,89% (744 orang) <p>Isu Gender :</p> <p>Faktor Kesenjangan:</p> <p>Partisipasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wanita kurang berperan <p>Kontrol</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kontrol dari perempuan untuk menentukan bahwa ia ingin terlibat di KSB <p>Manfaat</p> <p>Kurang dapat dimanfaatkan oleh perempuan</p> <p>Sebab Kesenjangan Internal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih adanya pandangan terhadap wanita termasuk golongan lemah - Anggaran dan SDM pendukung kurang <p>Sebab Kesenjangan Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya minat wanita untuk ikut dalam penanganan bencana - Masih banyaknya wanita-wanita yang berperan ganda - Masyarakat masih menganggap wanita itu tidak mampu melaksanakan pekerjaan PB 	
6	Rencana Aksi	Aktivitas 1	Meningkatkan kapasitas SDM internal lembaga tentang PUG
		Aktivitas 2	Sosialisasi kepada masyarakat
		Aktivitas 3	Melakukan seleksi anggota KSB
		Aktivitas 4	Melaksanakan pelatihan dan pembinaan kepada anggota KSB
7	Alokasi Anggaran Output Kegiatan		Rp. 230.000.000.-

8	Dampak/hasil Output Kegiatan	<p>Output:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya jumlah KSB menjadi 82 KSB 2. Meningkatnya jumlah wanita dalam KSB menjadi 20% <p>Outcome:</p> <p>Semakin cepat dan semakin baiknya penanggulangan bencana</p>
---	---------------------------------	---



GAP (Gender Analysis Pathway)

**OPD : Dinas Pengandalan Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Agam**

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
PROGRAM :	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender		Kebijakan dan Rencana Ke Depan		Pengukuran Hasil		
KEGIATAN :	Faktor Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-line)	Indikator Gender	
PROGRAM : Program Pembinaan KB KEGIATAN : Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kab/Kota. SUB KEGIATAN : <ul style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kesertaan KB Pria. 2. Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB. 3. Promosi dan konseling kesehatan reproduksi serta hak-hak reproduksi di fasilitas kesehatan dan kelompok kegiatan. 	Akses: Peserta KB Aktif masih didominasi oleh perempuan • Peningkatan pelayanan KB masih kurang (tenaga penyuluhan yang masih kurang). Partisipasi <u>Masih Kurangnya</u> Partisipasi Laki-laki sebagai akseptor KB Kontrol <u>Masih kurangnya</u> keterlibatan laki-laki dalam pengambilan keputusan untuk ikut ber KB.	<ul style="list-style-type: none"> SDM yang melakukan pelayanan masih rendah terutama dalam Komunikasi Interpersonal PKB. Terbatasnya jumlah tenaga PKB karena banyak yang memasuki usia pensiun. Minimal jumlah Tenaga Penyuluhan KB satu Nagari satu Penyuluhan KB (82 Nagari 82 Penyuluhan KB), sedangkan jumlah tenaga penyuluhan yang ada baru 18 orang. 	<ul style="list-style-type: none"> Isu agama ber KB itu Haram Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang MOP. Image masyarakat bahwa yang ber KB itu adalah perempuan Adanya mitos tentang MOP yaitu pria akan mengalami gangguan seksual setelah melakukan MOP Belum maksimalnya sosialisasi dan advokasi KIE 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Rasio Akseptor KB baik bagi laki-laki dan perempuan. Meningkatkan kader-kader KB (PPKBD) dan sub PPKBD sebanyak 1.251 orang Meningkatkan supervisi, monitoring dan evaluasi pencapaian peserta KB baru dan KB Aktif. Dalam menentukan kepesertaan akseptor KB berdasarkan target yang ditetapkan oleh Provinsi dan Nasional (Rasio Akseptor KB/jumlah PUS) 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pengetahuan PKB dan Kader melalui On The Job Training. Memberdayakan kader-kader KB (PPKBD) sebanyak 271 akseptor). Peserta KB Aktif masih didominasi oleh perempuan Tenaga Penyuluhan KB yang melakukan pelayanan sebanyak 18 orang (perempuan 15 orang dan laki-laki 3 orang). Masing berkembangnya image masyarakat "banyak anak banyak rezeki" Monitoring dan evaluasi masih belum maksimal Tenaga Penyuluhan KB yang melakukan pelayanan sebanyak 18 orang (perempuan 15 orang dan laki-laki 3 orang). 	<ul style="list-style-type: none"> Pencapaian Peserta KB MOW sebanyak 2672 akseptor dan Peserta KB MOP Laki-laki sebanyak 271 akseptor). Peserta KB Aktif sebanyak 271 akseptor. Anggaran sub kegiatan Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB sebanyak Rp. 2.500.000.000 Anggaran sub kegiatan Promosi dan konseling kesehatan reproduksi serta hak-hak reproduksi di fasilitas kesehatan dan kelompok kegiatan Minimal jumlah Tenaga Penyuluhan KB satu Nagari satu Penyuluhan KB (82 Nagari 82 Penyuluhan KB) Rekrutmen tenaga PKB. 	Input : <ul style="list-style-type: none"> • Anggaran sub kegiatan peningkatan kesertaan KB Pria sebanyak Rp. 150.000.000 • Anggaran sub kegiatan Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB sebanyak Rp. 2.500.000.000 • Anggaran sub kegiatan Promosi dan konseling kesehatan reproduksi serta hak-hak reproduksi di fasilitas kesehatan dan kelompok kegiatan 	

<p>TUJUAN :</p> <p>Peningkatan kesertaan KB Pria</p>	<p>sebanyak Rp. 300.000.000</p> <p>Output :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kompetensi tenaga Penyuluhan KB dan Kader. • Meningkatnya capaian MOP. <p>Outcome :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk, administrasi kependudukan dan pengaruhnya terhadap gender Impact: • Terwujudnya Keluarga Kecil yang berkualitas <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kompetensi tenaga Penyuluhan KB dan Kader.
---	---



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

*Jl. Komplek GOR. Rang Agam Padang Baru Lubuk Basung
Telp/Fax (0752) 87010161 Email : Daldukkbpppa@agam.go.id*

GENDER BUDGET STATEMENT
(PERNYATAAN ANGGARAN GENDER)

OPD	: DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
T.A	: 2022
PROGAM	: Program Keluarga Berencana
KEGIATAN	: Pembinaan Keluarga Berencana
SUB KEGIATAN	1. Peningkatan Kesertaan KB Pria. 2. Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB. 3. Promosi dan konseling kesehatan reproduksi serta hak-hak reproduksi di fasilitas kesehatan dan kelompok kegiatan.
KODE REKENING	: 2.14.03.2.03
ANALISIS SITUASI	: Undang-udang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga merupakan landasan hukum dalam penyelenggaraan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Pada pasal 47 dinyatakan bahwa; Pemerintah dan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal. Untuk mencapai sasaran pembangunan yang berwawasan kependudukan maka diperlukan upaya nyata dan lebih meningkatkan komitmen pada program KB bukan hanya pada dimensi kependudukan, tetapi lebih diarahkan pada pembangunan keluarga dengan seluruh anggota keluarga.
	1. Data Pembuka Wawasan <ul style="list-style-type: none">• Peserta KB Aktif masih didominasi oleh perempuan• Pencapaian Peserta KB MOW sebanyak 2672 akseptor dan Peserta KB MOP 271 akseptor dari 61.000 PUS di Kab.Agam.• Minimal jumlah Tenaga Penyuluhan KB satu Nagari satu Penyuluhan KB (82 Nagari 82 Penyuluhan KB).• Tenaga Penyuluhan KB yang melakukan pelayanan sebanyak 18 orang (perempuan 16 orang dan laki-laki 2 orang).
	2. Issu dan Faktor Kesenjangan Gender Akses: Akses untuk mendapatkan pelayanan KB masih kurang (tenaga penyuluhan yang masih kurang). Partisipasi Masih kurangnya Partisipasi Laki-laki sebagai akseptor KB Kontrol • Masih kurangnya keterlibatan laki-laki dalam pengambilan keputusan untuk ikut ber KB.

	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam menentukan kepesertaan akseptor KB berdasarkan target yang ditetapkan oleh Provinsi dan Nasional (Rasio Akseptor KB/ jumlah PUS) <p><u>Manfaat</u></p> <p>Program KB dalam upaya mengendalikan pertumbuhan penduduk serta meningkatkan Keluarga kecil yang berkualitas masih belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terutama keluarga miskin karena belum semua keluarga miskin yang mendapatkan akses dan pelayanan KB.</p> <p>Penyebab Internal/Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SDM yang melakukan pelayanan masih rendah terutama dalam Komunikasi Interpersonal PKB. ▪ Terbatasnya jumlah tenaga PKB karena banyak yang memasuki usia pensiun. ▪ Belum maksimalnya sosialisasi dan advokasi KIE. • Monitoring dan evaluasi masih belum maksimal • Isu agama ber KB itu Haram • Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang MOP. • Image masyarakat bahwa yang ber KB itu adalah perempuan • Adanya mitos tentang MOP yaitu pria akan mengalami gangguan seksual setelah melakukan MOP • Masih berkembangnya image masyarakat “banyak anak banyak rezeki”
--	--

RENCANA TINDAK LANJUT	Sub Kegiatan	Peningkatan Kesertaan KB Pria.	
		Tujuan	Peningkatan kesertaan KB Pria
		Aktifitas 1	<p>Meningkatkan promosi dan sosialisasi tentang KB khususnya bagi laki-laki.</p> <p>Tujuan : Meningkatnya pengetahuan masyarakat umumnya dan laki-laki khususnya tentang MOP.</p>
		Aktifitas 2	<p>Memberdayakan kader-kader KB (PPKBD dan sub PPKBD) sebanyak 1.251 orang</p> <p>Tujuan : Memastikan agar para kader-kader komit dalam mencari dan memberi pelayanan pada Peserta KB Baru dan KB Aktif.</p>
		Aktifitas 3	<p>Meningkatkan pengetahuan PKB dan Kader melalui On The Job Training</p> <p>Tujuan : Memastikan seluruh PKB dan para kader mampu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam memberikan pelayanan KB.</p>
	Sumber Daya/ Input		<p>a. Tenaga Penyuluhan KB sebanyak 18 orang</p> <p>b. PPKBD dan sub PPKBD (kader) sebanyak 1.251 orang</p>

ALOKASI SUMBER DAYA	Output	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kompetensi tenaga Penyuluh KB dan Kader. • Meningkatnya capaian MOP
	ANGGARAN	Rp. 150.000.000
	Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB	
	Aktifitas 1	<p>Memberdayakan kader-kader KB (PPKBD dan sub PPKBD) sebanyak 1.251 orang</p> <p>Tujuan : Memastikan agar para kader-kader komit dalam mencari dan memberi pelayanan pada Peserta KB Baru dan KB Aktif.</p>
	Aktifitas 2	<p>Meningkatkan pengetahuan PKB dan Kader melalui On The Job Training</p> <p>Tujuan : Memastikan seluruh PKB dan para kader mampu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam memberikan pelayanan KB.</p>
	Aktifitas 3	<p>Meningkatkan supervisi dalam monitoring dan evaluasi pencapaian peserta KB Baru dan KB Aktif</p> <p>Tujuan : Supervisi kinerja Penyuluh KB dalam pencapaian peserta KB baru sesuai dengan PPM yang telah ditetapkan.</p>
	Aktifitas 4	<p>Rekrutmen tenaga PKB</p> <p>Tujuan : Meningkatnya SDM dan jumlah tenaga PKB.</p>
	Sumber Daya/ Input	a. Tenaga Penyuluh KB sebanyak 18 orang. b. PPKBD dan sub PPKBD (kader) sebanyak 1.251 orang
	Output	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kompetensi tenaga Penyuluh KB dan Kader. • Meningkatnya capaian MOP
	ANGGARAN	Rp. 2.500.000.000.
Promosi dan konseling kesehatan reproduksi serta hak-hak reproduksi di fasilitas kesehatan dan kelompok kegiatan.		
	Aktifitas 1	<p>Meningkatkan promosi dan sosialisasi tentang KB khususnya bagi laki-laki.</p> <p>Tujuan : Meningkatnya pengetahuan masyarakat umumnya dan laki-laki khususnya tentang MOP.</p>
	Sumber Daya/ Input	a. Tenaga Penyuluh KB sebanyak 18 orang. b. PPKBD dan sub PPKBD (kader) sebanyak 1.251 orang.

		Out Put	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kompetensi tenaga Penyuluh KB dan Kader. • Meningkatnya capaian MOP.
ALOKASI SUMBER DAYA	Anggaran	Rp. 300.000.000,-	
	SDM	a. Tenaga Penyuluh KB sebanyak 24 orang b. PPKBD dan sub PPKBD (kader) sebanyak 1.251 orang	
DAMPAK/HASIL/MANFAAT	1. Terwujudnya Keluarga Kecil yang berkualitas 2. Meningkatnya kompetensi tenaga Penyuluh KB dan Kader		



DINAS KESEHATAN KABUPATEN AGAM TAHUN 2022
FORMAT GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Kesehatan Lainnya Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	dokter (54 dokter perempuan, 6 dokter Laki-laki), 378 orang bidan, 118 orang perawat,	kurang	3. Kontrol	dari Dinas Kesehatan
4. 5.	TUJUAN: Menurunkan angka kematian ibu	Masih belum terpenuhi jumlah nakes di Puskesmas contoh dokter (27 orang), bidan(43 orang) dan perawat (69 Orang) Kurangnya bimbingan dari Dinas Kesehatan	4. Manfaat -	3. Terehabnya Pustu 4. Tersediannya prasarana dan alkes 5. Pengangkatan nakes

FORM PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (PAG/GBS)

NO	ASPEK	URAIAN
1	Program Kegiatan Sub Kegiatan	<p>PROGRAM: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</p> <p>1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota 2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>a. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin b. Pembangunan Puskesmas c. Rehabilitasi dan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan d. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan e. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</p>
2	Indikator kinerja sub kegiatan	<p>1. Tersedianya jaminan persalinan pada ibu 2. Terbangunnya Puskesmas 3. Tereabilitasi Pustu 4. Tersedianya alat kesehatan Puskesmas 5. Pengangkatan Nakes</p>
3	Tujuan sub kegiatan	<p>1. Menurunnya angka kematian ibu dan anak 2. Pembangunan Puskesmas 3. Tereabilitasi Pustu 4. Tersedianya alat kesehatan Puskesmas 5. Pengangkatan Nakes</p>
4	Kode Rekening Kegiatan	
5	Analisa situasi	<p>1. Data Pasangan usia subur 82.298 Jiwa 2. Data ibu hamil 9.700 jiwa 3. Dari 23 Puskesmas, terdapat 11 Puskesmas Rawat Inap, 12 Non Rawat Inap, 18 Puskesmas one day care, 7 Puskesmas Ponred 4. Tenaga Kesehatan terdiri dari 60 orang dokter (54 dokter perempuan, 6 dokter Laki-laki), 378 orang bidan, 118 orang perawat (100 orang perempuan, 18 orang laki-laki)</p>
6	Rencana Aksi	Aktivitas 1 Memberikan jaminan persalinan pada ibu Tujuan : Menurunkan angka kematian ibu dan anak
		Aktivitas 2 Pembangunan Puskesmas Tujuan : Pembangunan Puskesmas
		Aktivitas 3 Rehabilitasi Pustu Tujuan: Rehabilitasi Pustu
		Aktifitas 4 Tersedianya alat kesehatan Tujuan: Tersediannya alat kesehatan Puskesmas
		Aktifitas 5 Pengangkatan Nakes Tujuan :Pengangkatan Nakes dengan perjanjian kinerja (P3K)
7	Alokasi Anggaran per sub kegiatan	<p>1. Pagu anggaran sub kegiatan Jampersal adalah 1.999.0000 2. Pagu anggaran sub kegiatan pembangunan Puskesmas Rp.18.000.000.000,- 3. Pagu anggaran sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Rp.6.050.000.000,- 4. Pagu anggaran Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rp. 1.290.000.000,-</p>

			6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Rp. 5.250.000.000,-
8	Dampak/hasil Output sub kegiatan		<p>Output</p> <p>1. Terjaminnya Persalinan Ibu 2. Terbangunnya Puskesmas 3. Terehabnya Pustu 4. Tersedianya prasarana dan alkes</p> <p>Outcome</p> <p>1. Merunnya angka kematian ibu dan anak</p> <p>Impact</p> <p>Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat</p>



OPD : DINAS SOSIAL
Kabupaten Agam

GAP (Gender Analysis Pathway)

Dipindai dengan CamScanner

PROGRAM :	Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
KEGIATAN:	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender				Pengukuran Hasil			
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender	
Program Pemberdayaan Sosial	Jumlah Kelembagaan Sosial yang dibina sebanyak 23 • Jumlah TKSK yang dibina sebanyak 16 orang (Laki. 13 dan Perempuan 3) • Jumlah Tagana yang diberdeyakan sebanyak 18 orang (laki.laki. 14 perempuan 4) • Jumlah PSM yang dibina sebanyak 141 (laki 50 dan perempuan91.)	Akses <ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya TKSK, Tagana dan PSM yang mengelola Kelembagaan Sosial <u>Partisipasi</u> <ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman terkait dengan pekerjaan Sosial masih kurang <u>Kontrol</u> <ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat minat masyarakat menjadi TKSK, Tagana dan PSM dalam kelembagaan Sosial 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya partisipasi masarakat untuk menjadi Pekerja Sosial <ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman terkait dengan pekerjaan Sosial masih kurang <ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya minat masyarakat menjadi TKSK, Tagana dan PSM dalam kelembagaan Sosial 	<ul style="list-style-type: none"> • Pekerjaan sebagai Pekerja sosial belum optimal dikenakan oleh faktor ekonomi dan pekerjaan lain <ul style="list-style-type: none"> • Minat masyarakat menjadi TKSK, Tagana dan PSM dalam kelembagaan Sosial 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Pengembangan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pembinan terhadap pekerja Sosial yang ada <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pemahaman atau pengertian kepada masyarakat terkait dengan manfaat dari pekerja Sosial 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah kelembagaan Sosial yang dibina yang ada <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Tagana yang diberdeyakan sebanyak 18 orang (laki laki. 14 perempuan 91) 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah kelembagaan Sosial yang dibina yang ada <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Tagana yang diberdeyakan sebanyak 18 orang (laki laki. 14 perempuan 91) 	<ul style="list-style-type: none"> Output : <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah kelembagaan Sosial yang dibina yang ada <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah TKSK yang dibina sebanyak 16 orang (laki 13 dan perempuan 3.) <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Tagana yang diberdeyakan sebanyak 18 orang (laki laki. 14 perempuan 91)
Out Put :	PSM, KUBE, Karang Taruna, Tagana, TKSK, WKSBM dan Orsos						Outcome :		
							Terwujudnya Tenaga TKSK, Tagana dan PSM yang handal dan terampil		

TUJUAN: Pengembangan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial	tangan Pemerintah dalam penangganan terkait dengan Kesejahteraan Sosial	



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

DINAS SOSIALJl. Sudirman No. 1 Lubuk Basung Telp. (0752) 76306, 877393 Fax 76310
www.agamkab.go.id**GENDER BUDGET STATEMENT****(PERNYATAAN ANGGARAN GENDER)**

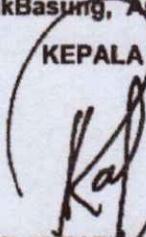
OPD	: DINAS SOSIAL
T.A	: 2022
PROGAM	: Program Pemberdayaan Sosial
KEGIATAN	: Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten /Kota
SUB KEGIATAN	: Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat
KODE REKENING	: 1.06.02.2.03.04
ANALISIS SITUASI	<p>: Undang-undang terkait dengan pekerjaan sosial</p> <ol style="list-style-type: none">1. Permensos No 10 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Massyarakat (PSM)2. Permensos No 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Masyarakat (TKSK)3. Permensos No 10 Tahun 2014 tentang Penyuluhan Sosial Masyarakat (PENSOSMAS)4. Permensos No 28 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana (TAGANA) <p>1. Data Pembuka Wawasan</p> <ul style="list-style-type: none">• Jumlah kelembagaan Sosial yang dibina sebanyak 23• Jumlah TKSK yang dibina sebanyak 16 orang (Laki 13 orang dan Perempuan 3)• Jumlah Tagana yang diberdayakan sebanyak 18 orang (laki laki 14 dan Perempuan 4)• Jumlah PSM yang dibina sebanyak 140 (laki 50. dan perempuan 90.) <p>2. Issu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>Akses: Terbatasnya TKSK, Tagana dan PSM yang mengelola Kelembagaan Sosial</p> <p>Partisipasi: Masih kurangnya minat masyarakat menjadi TKSK, Tagana dan PSM dalam kelembagaan Sosial</p> <p>Kontrol: TKSK, Tagana dan PSM belum memaksimalkan pekerjaannya sesuai dengan Tugas dan fungsinya</p> <p>Manfaat: TKSK, Tagana dan PSM menjadi penyambung tangan Pemerintah dalam penanganan terkait dengan Kesejahteraan Sosial</p>

	<p>Penyebab Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Masih kurangnya partisipasi masarakat untuk menjadi Pekerja Sosial ▪ Pemahaman terkait dengan pekerjaan Sosial masih kurang ▪ Masih kurangnya Kopetensi TKSK, Tagana dan PSM <p>Penyebab Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pekerjaan sebagai Pekerja Sosial belum optimal dikenakan oleh faktor ekonomi dan pekerjaan lain
--	---

RENCANA TINDAK	Sub Kegiatan	
		<p>Tujuan</p> <p>Peningkatan Pengembangan Potensi Sumber daya Kesejahteraan Sosial</p>
	Aktifitas 1	Meningkatkan pembinaan terhadap pekerja Sosial yang ada
	Aktifitas 2	Memberikan pemahaman atau pengertian kepada masyarakat terkait dengan mamfaat dari pekerja Sosial
	Aktifitas 3	Melakukan monitoring dan evaluasi
	Sumber Daya/ Input	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah TKSK yang dibina sebanyak 16 orang (Laki.13 dan Perempuan 3.) • Jumlah Tagana yang diberdayakan sebanyak 18 orang (laki laki 14 perempuan 4) Jumlah PSM yang dibina sebanyak 140 (laki 50 dan perempuan 90.)
	Out Put	<p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kompetensi TKSK, Tagana dan PSM 2. Tenaga TKSK, Tagana dan PSM mampu menjalankan menjalankan tugas dan fungsinya didalam masyarakat
ALOKASI SUMBER DAYA	Anggaran Rp. 534.000.000,-	
DAMPAK/HASIL/MANFAAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kompetensi TKSK, Tagana dan PSM 2. Tenaga TKSK, Tagana dan PSM mampu menjalankan menjalankan tugas dan fungsinya didalam masyarakat 3. Terwujudnya Tenaga TKSK, Tagana dan PSM yang handal dan terampil 	

Lubuk Basung, April 2021

KEPALA


RAHMI ARTATI, S.TP,MSi
NIP.19781229 199711 2 001

FORMAT GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN AGAM

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Pilih Kebijakan/ Program/ Kegiatan yang akan dianalisis	Data Pembuka Wawasan		Isu Gender		Kebijakan dan Rencana Ke Depan		Pengukuran Hasil	
Prgram: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Faktor Kesenjangan Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-line)	Indikator Gender	
Data terpilih: Jumlah Sekolah SD: 437 Jumlah Siswa: 54.863 Org Siswa SD Laki-Laki = 28.870 Org Siswa SD Perempuan: 25.993 org berdasarkan Permendiknas Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana Pendidikan Rasio kebutuhan WC antara laki-laki 25 : 1 dan perempuan	Akses	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya pemahaman persoalan gender bagi pengambil kebijakan khususnya terhadap kebutuhan sarana dan prasarana (Jamban Sekolah) pada Sekolah Dasar 	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya peranan komite sekolah dalam pemenuhan ketersediaan jamban sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya sarana dan prasarana (Jamban Sekolah) sesuai dengan permendiknas nomor 24 tahun 2007. 	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi permendiknas nomor 84 tahun 2008 tentang pengarusutamaan gender bidang pendidikan. Sosialisasi tentang Jamban sekolah yang responsive gender terhadap kepala sekolah dan komite sekolah Masih kurangnya ketersediaan Jamban Sekolah bagi Laki-laki dan perempuan. Masih Kurangnya komitmen pengambil kebijakan di sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> WC Laki-laki: yang ada 744 unit, WC Perempuan: yang ada 644 unit. WC yang dibutuhkan: WC siswa laki-laki: 411 unit WC Siswa Perempuan: 655 unit • Pembangunan sarana dan prasarana (Jamban Sekolah) yang responsif gender 	<ul style="list-style-type: none"> Terbangunnya Kebutuhan Jamban Sekolah/WC, WC siswa laki-laki: 60 unit Siswa Perempuan: 60 unit Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan prasarana sekolah (Jamban Sekolah) seluruh siswa baik siswa laki-laki 	

Tujuan: Terbangunnya Sarana Prasarana Sekolah (Jamban Sekolah) yang seimbang antara laki-laki dan perempuan	20 : 1 WC Laki-laki: seharusnya 1.155 unit, WC Laki-laki: yang ada 744 unit, WC Perempuan: seharusnya: 1.299 unit.	Dasar. <ul style="list-style-type: none">Kurangnya pemahaman pengambil kebijakan di sekolah dasar tentang PPRG	maupun Perempuan
---	--	---	------------------

Lubuk Basung, April 2021
Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Agam



FORM PERNYATAAN ANGGRAN GENDER (PAG/GBS)

NO	ASPEK	URAIAN
1	Program : Kegiatan : Sub Kegiatan :	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
2	Indikator kinerja kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana Sekolah (Jamban Sekolah) yang sesuai dengan aturan (Permendiknas nomor 24 tahun 2007) antara laki-laki dan perempuan
3	Tujuan kegiatan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Sekolah (Jamban Sekolah) yang responsive gender
4	Kode Rekening Kegiatan	18.1.1.2.2.01.6
5	Analisa situasi	<p>Data Pembuka wawasan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Agam memiliki sebanyak 437 Sekolah Dasar, dengan jumlah siswa Laki-Laki = 28.870 org, Siswa perempuan: 25.993 org 2. Jumlah WC siswa laki-laki yang ada 744 unit, WC Perempuan: yang ada 644 unit. Kebutuhan wc bagi siswa laki-laki 1 : 25 dan siswa perempuan 1 : 20. WC yang dibutuhkan untuk SD Kab Agam sesuai dengan jumlah siswa adalah : untuk siswa laki-laki: 1.155 unit Siswa Perempuan: 1.299 unit <p>Kesenjangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Berdasarkan data yang ada saat ini, terdapat ketidaksetaraan gender di bidang pendidikan khususnya ketersediaan sarana sarana dan prasarana (Jamban Sekolah) yang seimbang antara siswa laki-laki dan perempuan. 4. Akses perempuan untuk mendapatkan sarana dan prasarana SD (Jamban Sekolah) masih kurang, sehingga manfaat dari pembangunan sarana Prasarana (Jamban Sekolah untuk siswa SD masih belum dinikmati oleh sebagian besar siswi perempuan <p>Faktor Internal dan Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Ketidaksetaraan gender dalam hal ketersediaan Jamban siswa disebabkan karena kurangnya pemahaman persoalan gender bagi pengambil kebijakan khususnya terhadap kebutuhan sarana dan Prasaranan (Jamban Sekolah). 6. Usulan Kepala sekolah terhadap pembangunan Jamban belum memperhatikan kebutuhan Jamaban siswa perempuan dan laki-laki karena kurangnya pemahaman kepala sekolah dan guru tentang persoalan gender.

6	Rencana Aksi (diambil dari langkah 7 analisis GAP)	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi permendiknas nomor 84 tahun 2008 tentang pengarusutamaan gender bidang pendidikan. Sosialisasi tentang Jamban sekolah yang responsive gender terhadap kepala sekolah dan komite sekolah Pembangunan sarana dan prasarana (Jamban Sekolah) yang responsif gender 	<ul style="list-style-type: none"> Tujuan: Tersedinya sarana dan prasarana (Jamban Sekolah) sesuai dengan permendiknas nomor 24 tahun 2007. Aktivitas.1: Sosialisasi permendiknas nomor 84 tahun 2008 tentang pengarusutamaan gender bidang pendidikan. Aktivitas 2 Sosialisasi tentang Jamban sekolah yang responsive gender terhadap kepala sekolah dan komite sekolah Aktivitas.3: Pembangunan sarana dan prasarana (Jamban Sekolah) SD
			<p>Out Put Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kepala Sekolah yang telah mengikuti sosialisasi tentang kesetaraan gender dalam hal pengadaan Jamban/wc sekolah Terbangunnya Kebutuhan Jamaban/WC, WC siswa laki-laki: 60 unit , WC Siswa Perempuan: 60 unit
7	Alokasi Anggaran Output Kegiatan		Rp. 3.878759.640,-
8	Dampak/hasil Output Kegiatan		Tersedianya sarana dan prasarana utilitas (Jamban Sekolah) SD yang seimbang antara Laki-laki dan Perempuan



FORMAT GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) TAHUN 2022
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9	Pengukuran Hasil			
									Kebijakan dan Rencana Ke Depan	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-line)
Kebijakan/ Program/ Kegiatan yang akan dianalisis	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender	Faktor Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-line)	Indikator Gender				
Program : Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja Kegiatan : Sesuai dengan alokasi anggaran, jumlah Pencaker yang dilatih di BLK tahun 2020 sebanyak 4 angkatan (64 orang). Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Sub kegiatan : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pelatihan keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan klasster kompetensi Tujuan : Memberikan pelatihan keterampilan berbasis	Akses Tidak ada, akses diberikan kepada seluruh pencari kerja baik laki-laki maupun perempuan Partisipasi Peserta pelatihan sebagian besar adalah laki-laki Kontrol Representasi perempuan sebagai pimpinan kelompok tidak ada Manfaat Pelatihan ini bermanfaat untuk meningkatkan	- Belum ada kebijakan mengenai perbandingan laki-laki dan perempuan dalam mengikuti pelatihan di BLK - Peserta pelatihan sebagian besar adalah laki-laki - Banyaknya peserta laki-laki karena jenis pelatihan sesuai dengan bidang pekerjaan laki-laki - Perempuan cenderung tidak berminat untuk mengikuti jenis pelatihan tertentu yang umumnya diminati laki-laki	- Kurangnya minat pencari kerja khususnya perempuan untuk mengikuti pelatihan di BLK - Masih adanya budaya di sebagian besar keluarga/masyarakat pada perempuan agar tidak bekerja disektor laki-laki - Kondisi geografis (jarak dari kecamatan ke BLK cukup jauh)	- Memberikan pelatihan keterampilan lan berbasis kompetensi bagi pencari kerja laki-laki dan perempuan - Meningkatkan jumlah/jenis pelatihan yang responsif gender perempuan - Meningkatkan jumlah/wirusaha dan menururnya Tingkat Pengangguran Terbuka perempuan	- Menyusun kebijakan mengenai proporsi peserta pelatihan antara laki-laki dan perempuan - Meningkatkan jumlah/jenis pelatihan tahun 2020 yaitu 3 : 1 - Meningkatkan jumlah/wirusaha dan menururnya Tingkat Pengangguran Terbuka perempuan	- Perbandingan peserta pelatihan di BLK antara laki-laki dan perempuan pelatihan berbasis kompetensi - Output : Meningkatnya jumlah pencari kerja perempuan yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi - Outcome : Meningkatnya jumlah wirusaha dan menururnya Tingkat Pengangguran Terbuka perempuan						

kompetensi bagi pencari kerja	<p>keterampilan pencari kerja sebelum mencari pekerjaan/memulai usaha</p>	<p>Kontrol</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peserta didominasi oleh laki-laki 	<p>Manfaat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya pengetahuan sebagian pencari kerja perempuan untuk berkiprah dibidang usaha yang umumnya diminati laki-laki 	
-------------------------------	---	--	---	--

Lubuk Basung, 1 April 2021



19620219 1982102001

FORM PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (PAG/GBS) TAHUN 2022
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
KETENAGAKERJAAN

NO	ASPEK	URAIAN
1	Program : Kegiatan :	Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi
2	Indikator kinerja kegiatan	Jumlah pencari kerja yang dilatih
3	Tujuan kegiatan	Meningkatnya keterampilan berbasis kompetensi kepada pencari kerja/penganggur.
4	Kode Rekening Kegiatan	2.18.2.07.3.32.07.00.2.07.03.2.01.01
5	Analisis situasi	<p>Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) merupakan pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja. Diharapkan setelah melaksanakan pelatihan, peserta dapat membuka lapangan kerja sendiri atau bekerja diperusahaan dengan keterampilan yang telah dimiliki.</p> <p>Berdasarkan data tahun 2020, jumlah pelatihan yang dilaksanakan di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Agam sebanyak 4 kejuruan yaitu : memasak, menjahit, las dan service sepeda motor dengan jumlah peserta sebanyak 64 orang terdiri dari 39 laki-laki dan 25 orang perempuan.</p> <p>Untuk pelatihan service sepeda motor seluruh pesertanya laki-laki, pelatihan las seluruh pesertanya laki-laki, sementara menjahit pakaian sesuai style seluruh pesertanya perempuan dan perakitan komputer 9 orang perempuan dan 7 orang laki-laki.</p> <p>Berdasarkan kondisi diatas terjadi permasalahan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah peserta pelatihan di BLK tahun 2020, dari 64 orang jumlah peserta pelatihan, peserta perempuan sebanyak 25 orang (lebih dari 1/3). 2. Untuk jenis pelatihan tertentu seperti las dan service sepeda motor tidak ada peserta perempuan. <p>Penyebab internal antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya kebijakan mengenai perbandingan peserta laki-laki dan perempuan dalam mengikuti pelatihan di BLK 2. Belum maksimalnya sosialisasi mengenai pelaksanaan pelatihan di BLK <p>Penyebab eksternal antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya minat pencari kerja khususnya perempuan untuk mengikuti pelatihan di BLK 2. Masih adanya budaya di sebagian besar keluarga/masyarakat pada perempuan agar tidak bekerja di sektor yang umumnya dikerjakan laki-laki 3. Kondisi geografis (jarak dari kecamatan ke BLK cukup jauh)

6	Perencanaan Kegiatan	Rencana Aksi	1. Menyusun kebijakan mengenai proporsi peserta pelatihan antara laki-laki dan perempuan
			2. Meningkatkan jumlah/jenis pelatihan yang responsif gender
		Tujuan	Meningkatkan jumlah proporsi peserta pelatihan laki-laki dan perempuan
		Aktifitas	1. Meningkatkan sosialisasi mengenai pelatihan di BLK ke Kecamatan/Nagari 2. Menambah jumlah pelatihan yang responsif terhadap gender
		Sumber Daya	Dana : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pelaksana : Balai Latihan Kerja Kab. Agam
7	Alokasi Sumber Daya	Indikator Output	<u>Rumusan Kinerja</u> Meningkatnya jumlah pencari kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi <u>Indikator Kinerja</u> Jumlah perempuan yang mengikuti pelatihan minimal limapuluh persen
		Anggaran	Rp. 1.327.500.000,-
		SDM	Kepala BLK = 1 orang Kepala TU = 1 orang Staf = 4 orang Instruktur = 1 orang
		Peralatan	Peralatan untuk pelatihan : 1. menjahit 2. sepeda motor 3. las 4. komputer
8	Outcome	<u>Rumusan Kinerja</u> - Menurunnya jumlah pengangguran perempuan <u>Indikator Kinerja</u> - Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) perempuan menurun signifikan dan penurunan selisih TPT laki-laki dan perempuan.	

Lubuk Basung, 1 April 2021



FORMAT GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI TAHUN 2022

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Ke Depan			Pengukuran Hasil
PROGRAM :		Faktor Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi		Baseline	indikator gender (outcome) hasil yang diharapkan
<u>PROGRAM :</u> Administrasi Pemerintahan Desa <u>KEGIATAN :</u> Pembinaan dan Pengawasan Penyelegaraan Pemerintahan Desa <u>SUB KEGIATAN :</u> Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan Pembangunan Desa <u>OUTPUT :</u> Meningkatkan pemahaman dan kemampuan aparatur pemerintah nagari dalam menyusun RAB, RKP dan APB Nagari yang benar-benar dibutuhkan masyarakat setempat yang	-Walinagari : L : 76 = 92,6 % P : 6 = 7,4 % Perangkat Nagari L : 763 = 64,9% P : 412 = 35,1% -BAMUS : L :420=75% P :141=25% - Data tentang UU desa mewajibkan pemerintah ttg anggaran Pembangunan di nagari sebelumnya lebih banyak datangnya dari atas (top down) - UU desa no 6 tahun 2014 mengharuskan bahwa kerangka pembangunan masih kuatnya ; nilai-nilai di masyarakat di nagari	Ada kesenjangan dalam penetapan dan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan disebabkan : Akses terhadap pemahaman responsif gender I tingkat nagari masih rendah. Partisipasi perempuan masih rendah dalam keikutsertaan pada proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.	"Meningkatkan partisipasi dan akses masyarakat, baik laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga saja 2. Belum adanya juknis penyusunan RKP Nagari yang memuat responsif gender	1. Meningkatkan pemahaman tentang perencanaan dan penganggaran yang responsif gender melalui sosialisasi dan advokasi gender 2. Melakukan review RKP Nagari dengan berbasis perencanaan dan pengawasan pembangunan"	1. Tersusunnya juknis RKP yg sudah responsif gender 2. meningkatnya keterlibatan partisipasi masyarakat permpuan dan laki-laki dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 3. Mengkoordinasikan dengan pihak terkait untuk meningkatkan pemahaman tentang PUG bagi masyarakat	(dikopi dari langkah 2)	-Walinagari : L : 76 = 92,6% P : 6 = 7,4% -Perangkat Nagari L :763=64,9% P :412=35,1% -BAMUS : L :420=75% P :141=25%	1. Tersusunnya juknis RKP yg sudah responsif gender 2. meningkatnya keterlibatan partisipasi masyarakat permpuan dan laki-laki dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 3. Mengkoordinasikan dengan pihak terkait untuk meningkatkan pemahaman tentang PUG bagi masyarakat

responsif gender.	diperlukan partisipasi masyarakat	bahwa perempuan lebih baik berkiprah didalam rumah tangga saja.	Kontrol Perempuan lebih sedikit berperan dalam pelaksanaan perencanaan dan pembangunan di nagari :	Manfaat meningkatkan kemanauan dan partisipasi masyarakat perempuan dan laki-laki dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.	outcome : -Tersusunnya perencanaan pembangunan nagari yang lebih baik, terarah, efektif dengan mempertimbangkan responsif gender	Impact : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari	gender	L : 60% P : 40%
	-Juknis dalam penyusunan RKP Nagari belum mengarah ke pesertaan masyarakat baik laki-laki dan perempuan secara tegas (kurangnya responsif gender)							



FORM PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (PAG/GBS)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

NO	ASPEK	URAIAN
1	Program : Kegiatan : Sub Kegiatan :	Administrasi Pemerintahan Desa Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa <u>Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan Pembangunan Desa</u>
2	Indikator kinerja kegiatan	Jumlah APB Nagari dan Perubahan APB Nagari yang diklarifikasi : 164 dokumen Jumlah laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan fisik nagari : 82 dokumen Jumlah nagari yang dimonitor pelaksanaan kegiatan fisik : 82 nagari Jumlah perangkat nagari yang mengikuti bimtek keuangan dan penyusunan RAB : 392 orang Jumlah perna RKP nagari yang diklarifikasi : 82 dokumen Jumlah perna RPJM nagari yang diklarifikasi : 82 dokumen Jumlah RAB dan desain gambar pekerjaan fisik nagari yang di asistensi : 455 dokumen
3	Tujuan kegiatan	MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN NAGARI Meningkatkan partisipasi dan akses masyarakat, dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan
4	Kode Rekening Kegiatan	2.13.04.2.01.03
5	Analisa situasi	Data pembuka wawasan ✓ Dari kondisi Kabupaten Agam dengan 82 Nagari yang dipimpin oleh 76 walinagari laki-laki dan 6 orang walinagari perempuan atau perbandingan 92,6% : 7,4%, sementara perangkat nagari 763 orang laki-laki dan 412 orang perempuan, begitu juga Bamus nagari 420 orang laki-laki dan 141 orang perempuan. Juknis dalam penyusunan RKP Nagari belum mengarah ke masalah gender menunjukkan bahwa masih adanya kesenjangan partisipasi gender dalam pelaksanaan perencanaan dan pembangunan ditingkat nagari . Kesenjangan ✓ ✓ Ada kesenjangan gender dalam penetapan dan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan disebabkan Akses terhadap pemahaman responsif gender di tingkat nagari masih rendah. , Partisipasi dan keikutsertaan perempuan pada proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan masih rendah. Serta masih kuatnya nilai-nilai di masyarakat bahwa perempuan lebih baik berkiprah didalam rumah tangga saja Faktor internal dan eksternal . ✓ Kurangnya pemahaman gender pada perencanaan dan pelaksanaan program serta belum adanya juknis penyusunan RKP Nagari yang responsif gender ✓ Masih adanya nilai-nilai di masyarakat bahwa perempuan lebih baik mengurus rumah tangga saja .

6	Rencana Aksi	1. Aktifitas 1	<p>Meningkatkan pemahaman tentang perencanaan dan penganggaran yang responsif gender melalui sosialisasi dan advokasi gender ;</p> <p>Output :</p> <p>Dipahaminya responsif gender ini bagi setiap pengambil kebijakan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran di tingkat nagari</p> <p>Tujuan :</p> <p>Maksud dan tujuan aktifitas ini adalah menyamakan pemahaman setiap stek holder yang terlibat dalam penyusunan perencanaan kegiatan di tingkat nagari tentang responsif gender.</p>
		Aktifitas 2	<p>Melakukan review RKP Nagari dengan berbasis perencanaan dan penganggaran yang responsif gender</p> <p>Output:</p> <p>Terakomodirnya responsif gender dalam dokumen RKP masing-masing nagari</p> <p>Tujuan :</p> <p>Maksud dan tujuan kegiatan review ini adalah agar semua kegiatan yang akan di masukkan dalam RKP setiap nagari mengakomodir responsif gender.</p>
		Aktifitas 3	<p>Mengkoordinasikan dengan pihak terkait untuk meningkatkan pemahaman tentang PUG bagi masyarakat .</p> <p>Output:</p> <p>Dipahaminya responsif gender oleh setiap lapisan masyarakat</p> <p>Tujuan:</p> <p>Meningkatnya pemahaman terhadap responsif gender bagi masyarakat dan pengambil kebijakan.</p>
7	Alokasi Anggaran Output Kegiatan		Rp. 170.000.000,-
8	Dampak/hasil Output Kegiatan (langkah 9)		<p>indikator gender (outcome) hasil yang diharapkan</p> <p>output :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya juknis RKP yg sudah responsif gender 2. meningkatnya keterlibatan partisipasi masyarakat perempuan dan laki-laki dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 3. perencanaan, pelaksanaan pebangunan. <p>-Walinagari :</p> <p>L : 60%</p> <p>P : 40%</p>

			<p>-Perangkat Nagari L : 50% P :50%</p> <p>-BAMUS : L : 60 % P : 40%</p> <p>outcome :</p> <p>-Tersusunnya perencanaan pembangunan nagari lebih baik, terarah, efektif dengan mempertimbangkan responsis gender</p> <p>Impact : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari</p>
--	--	--	---



**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)**

SKPD TAHUN ANGGARAN	Sekretariat DPRD 2022		
PROGRAM	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		
KODE PROGRAM	4.02.02.2.		
KEGIATAN SUB KEGIATAN	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Pelaksanaan Reses		
ANALISIS SITUASI	<p>Data Pembuka Wawasan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan data Statistik Penduduk Laki laki Kabupaten Agam 236.418.000 orang dan perempuan 244.304.000. - Rumah Tangga Miskin 43.897 KK. - Jumlah Anggota DPRD 45 Orang 41 laki laki dan 4 orang perempuan. <p>Kesenjangan :</p> <p>Waktu pelaksanaan yang singkat dan animo konstituen yang kurang menyebabkan kegiatan itu kurang terasa mamfaatnya.</p> <p>Kondisi ini disebabkan oleh:</p> <p>Keterbatasan pengetahuan konstituen pentingnya Anggota DPRD melaksanakan Reses.</p> <p>Faktor penyebab kesenjangan internal dan eksternal</p> <p>Sebab kesenjangan internal :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak terpenuhinya aspirasi masyarakat oleh semua Anggota Dewan - Kurangnya SDM yang profesional untuk menfasilitasi dewan - Kurangnya sarana trasnportasi dewan <p>Sebab kesenjangan eksternal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak semua masyarakat bersedia menghadiri acara penghimpunan aspirasi karena faktor pekerjaan dan waktu 		
HASIL	Pembangunan yang berbasis aspirasi masyarakat		
RENCANA AKSI	Aktivitas 1	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu melakukan sosialisasi terhadap masyarakat - Mengadakan pertemuan dengan masyarakat dalam menjemput aspirasi 	
		Tujuan	Meningkatkan kehadiran masyarakat/Konstituen
		Langkah Kegiatan	Mengenalkan perlunya penyampaian Aspirasi
		Aktvitas 2	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat informasi pentingnya kegiatan Reses untuk diikuti/dihadiri - Melakukan Rekrut dan pelatihan pegawai dalam menfasilitasi dewan
		Tujuan	Masyarakat tahu mamfaat dan pentingnya Aspirasi disampaikan.
		Langkah Kegiatan	Perlunya sosialisasi tugas DPRD ke Masyarakat
CAPAIAN PROGRAM (di level kegiatan)	Terserapnya Aspirasi masyarakat		
TOTAL ANGGARAN SUB KEGIATAN	Rp. 841.572.500,-		

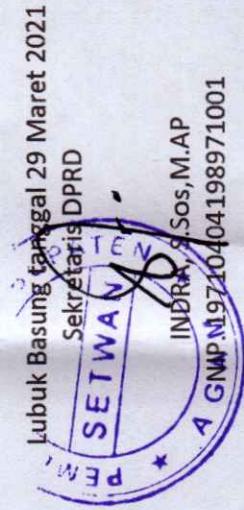


GAP (GENDER ANALYSIS PATHWAY)

OPD : SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN AGAM

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	ISU GENDER	KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN	PENGUKURAN HASIL	Langkah 8	Langkah 9
Data Pembuka Wawasan		Faktor Kesenjangan Internal		Sebab Kesenjangan Eksternal		Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
PROGRAM : Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Akses : - Jumlah penduduk Agam laki – laki 236.418.000 orang dan perempuan 244.304.000 orang	Partisipasi : - Kurangnya partisipasi laki-laki untuk menghadiri karena enggan meninggalkan pekerjaan sedangkan mereka tidak menerima uang transport dan uang saku	Kontrol : - 1 kali setiap masa sidang	Terdatanya Aspirasi/usulan yang disampaikan oleh masyarakat untuk Pembangunan	- Tidak semua masyarakat bersedia menghadiri acara penghimpunan aspirasi (Reses) karena faktor pekerjaan dan waktu	- Perlu melakukan sosialisasi terhadap masyarakat	- Jumlah penduduk Agam laki – laki 236.418.000 orang dan perempuan 244.304.000 orang	Output : - sosialisasi dan kunjungan kemasyarakatan 16 Kecamatan dan 82 nagari	
KEGIATAN : Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Partisipasi : - Rumah Tangga Miskin 43.897 KK	Kontrol : - Kurangnya sarana transportasi dewan	Kontrol : - Jumlah anggota DPRD Agam 45 org laki-laki.41 orang dan perempuan 4 orang	- Rumah Tangga Miskin 43.897 buah	- Mengadakan pertemuan dengan masyarakat dalam menjemput aspirasi	- Rumah Tangga Miskin 43.897 buah	- rekrut pegawai dan peningkatan kualitas sebanyak 52 orang	outcome: - penyuluhan aspirasi masyarakat melalui DPRD 100%	

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN			PENGUKURAN HASIL	
	Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja	
TUJUAN : Menjemput Aspirasi Masyarakat SASARAN : Masyarakat di Daerah Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan reses 3 kali setahun dengan waktu 4 hari setiap reses - Jumlah perempuan yang sudah melakukan kegiatan ekonomi produktif 	Manfaat: Waktu pelaksanaan yang singkat dan animo konstituen yang kurang menyebabkan kegiatan itu kurang terasa manfaatnya		<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan reses 3 kali setahun dengan waktu 4 hari setiap reses 		<ul style="list-style-type: none"> - impact pembangunan yang berbasis apirasi masyarakat 		



**FORMAT GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) DUKCAPIL KECAMATAN
TAHUN 2022**

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Program: Pencatatan Sipil	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Ke Depan			Pengukuran Hasil Indikator Gender (out come)
		Faktor Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-line)	
Kegiatan: Pelayanan Pencatatan Sipil	- Belum seluruh penduduk Kab Agam memiliki Akta Kehirian.	Akses : Masih ada masyarakat yang belum mendapatkan informasi dan sulitnya transportasi terutama bagi perempuan.	- Pendataan yang belum terpilih gender antara laki dan perempuan perempuan sulitnya transportasi terutama bagi perempuan.	- Sulitnya transportasi ketempat pelayanan bagi penduduk yang jauh dari pusat pelayanan perempuan terutama bagi perempuan.	- Seluruh penduduk Kabupaten Agam baik laki2 maupun perempuan memiliki Akta Kehirian	- Melakukan pendataan terhadap masyarakat daerah yang kesulitan transportasi perempuan memiliki Akta Kehirian	- Belum seluruh penduduk Kab Agam memiliki Akta Kehirian - Dari Jumlah Penduduk Kabupaten Agam 532.911 jiwa (268.979 laki dan 263.932 perempuan), yang telah memiliki akte kehirian - Melaksanak an pelayanan langsung penerbitan dokumen	- Meningkatkan ekskapan pelayanan penerbitan akta kelahiran dari 60% pada tahun 2021 menjadi 65 % pada tahun 2022
Sub. Kegiatan: Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	- Dari Jumlah Penduduk Kabupaten Agam 532.911 iwa 268.979	Partisipasi : Sebanyak 240.080 penduduk yang sudah	- Kurangnya SDM dalam pengolahan data terpilih	- Kurangnya SDM dalam pengolahan data terpilih untuk mengurus dokumen kependuduk an (akta kehirian).	- Kurangnya Sarana Prasarana pendukung kegiatan	- Melaksanak an pelayanan langsung penerbitan dokumen	- Meningkatkan pelayanan pada 4 (empat) kecamatan (Kec.Palupuh,	

Tujuan : Seluruh Penduduk Kabupaten Agam memiliki Akta kelahiran	diatas yang sudah punya akte kelahiran dari sebanyak 240.080 jiwa terdiri dari 121.607 laki-laki dan 118.473 perempuan, dan masih ada 292.831 jiwa yang belum memiliki akte kelahiran	<p>Kontrol :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada umumnya laki-laki yang lebih dominan untuk mendapatkan kesempatan untuk mengurus dokumen kependudukan masih ada 4 kec.yang wilayahnya terpencil yang kemungkin besar belum memiliki - Dari 16 kecamatan masih ada 4 kec.yang wilayahnya terpencil yang kemungkin besar belum memiliki 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya Kesadaran Masyarakat akan Fungsi dan Kegunaan Akta Kelahiran - - Pelayanan dengan Sistem Layanan Elektronik Kependudukan (SILEK ONLINE) di Nagari 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kependudukan ke daerah yang jauh dari pusat pelayanan. - yang belum memiliki akta kelahiran 292.831 jiwa 	118.473	118.473 perempuan.	Palembayan, Malalak, dan Kec Canduang)
			<ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan Kabupaten Agam - Seluruh Penduduk Kab Agam memiliki akt kelahiran. - Tercapainya target nasional yan sudah ditargetkan dari pusat 	<ul style="list-style-type: none"> - kependudukan ke daerah yang jauh dari pusat pelayanan. - Pelayanan dengan Sistem Layanan Elektronik Kependudukan (SILEK ONLINE) di Nagari 	292.831	292.831 jiwa	

akte kelahiran.	Perguruan Tinggi.		

FORM KAK/TOR

Program		PENCATATAN SIPIL
Sasaran Program		Penduduk Kabupaten Agam
Kegiatan		Pelayanan Pencatatan Sipil.
Sub. Kegiatan		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
Latar Belakang	Dasar Hukum	<p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan. Pasal 27 ayat (1) setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.</p> <p>Permendagri No.109 Tahun 2018 Tentang.....</p>
	Gambaran Umum	Dari jumlah penduduk kabupaten agam 532.911 jiwa yang sudah memiliki akta kelahiran 240.080 jiwa terdiri dari laki-laki 121.607 dan 118.473 perempuan, yang belum memiliki akta kelahiran 292.831 (54.94%) terdiri dari laki dan perempuan
Kegiatan	Uraian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pendataan terhadap masyarakat yang daerahnya kesulitan transportasi - Melakukan sosialisasi ke daerah terpencil dan jauh dari pusat pelayanan. - Pelayanan langsung ke daerah yang jauh dari pusat pelayanan ke nagari dan kecamatan
	Indikator Kinerja	Meningkatnya cakupan kepemilikan akte kelahiran
	Batasan Kegiatan	Penduduk yang belum memiliki akta kelahiran sebanyak 292.831 jiwa dari jumlah penduduk 532.911 jiwa. (54,9434%)
Maksud dan Tujuan		<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya dokumen pencatatan sipil yang akurat - Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan pada masyarakat bidang pencatatan sipil

		Faktor Internal dan Eksternal	<ul style="list-style-type: none"> - Pendataan yang belum terpilah gender antara laki-laki dan perempuan - Kurangnya SDM dalam pengolahan data terpilah - Kurangnya Sarana Prasarana Pendukung Kegiatan - Sulitnya transportasi ketempat pelayanan bagi penduduk yang jauh dari pusat pelayanan - Keterbatasan perempuan untuk mengurus dokumen kependudukan (akta kelahiran). - Kurangnya Kesadaran Masyarakat akan Fungsi dan Kegunaan Akta Kelahiran
6	Rencana Aksi	Kegiatan 1	<ul style="list-style-type: none"> - Pendataan terhadap masyarakat daerah yang kesulitan transportasi <p>Tujuan adanya data yang terpisah antara laki dan perempuan di daerah tersebut.</p>
		Kegiatan 2	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan sosialisasi melalui media sosial <p>Tujuan : supaya masyarakat di daerah tersebut mendapatkan informasi tentang pentingnya dokumen kependudukan khususnya bagi perempuan.</p>
		Kegiatan 3	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan langsung ke daerah yang jauh dari pusat pelayanan di nagari dan kecamatan. <p>Tujuan : memudahkan masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan (akta kelahiran) terutama bagi perempuan</p>
		Kegiatan 4	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan dengan Sistem Layanan Elektronik Kependudukan (SILEK ONLINE) di Nagari <p>Tujuan : memudahkan masyarakat mengurus dokumen kependudukan</p>
7	Alokasi Anggaran Output Kegiatan		Rp. 33.456.050,-

8	Dampak/hasil Output Kegiatan	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan cakupan pelayanan penerbitan akta kelahiran dari 60 % tahun 2021 menjadi 65 % tahun 2022- Meningkatkan pelayanan pada 4 kecamatan daerah yang sulit/jauh dari pusat pelayanan.-
---	------------------------------	--

Matrik Gender Analysis Pathway (GAP)	
OPD	: INSPEKTORAT KABUPATEN AGAM
PROGRAM	: PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : INSPEKTORAT KABUPATEN AGAM
PROGRAM : PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9	PENGUKURAN HASIL					
										Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	ISU GENDER			
										Sebab Kesenjangan Internal	Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
	- Jumlah Fungsional APP yang melakukan Pembinaan sebanyak Perempuan :30 Orang dan Laki - laki 22 Orang	Kasus pengaduan masyarakat yang akan ditangani	Manfaat : tercapainya penyelesaian kasus pengaduan 85%												
	- Jumlah cakupan penangganan kasus yang diselenggarakan sebanyak 56 kasus yang di Pemeriksa														
	a.	Penyusunan (Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2020													
	b.	penginventarisir penanganan kasus pengaduan masyarakat yang akan ditangani													

Lubuk Basung, April 2021

 Lubuk Basung, April 2021
 P E M E R I N T A H K E C A M A T A N L U B U K B A S U N G
 I N S P E K T O R A T
 D A F R I N E S , S E
 P e m b i n a U t a m a M u d a
 * A G A *

**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)**

**SKPD
TAHUN
ANGGARAN**

**: INSPEKTORAT
: 2021**

PROGRAM	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		
KODE PROGRAM	3.01.01.3.02.01.01.20		
ANALISIS SITUASI	Berdasarkan dari Hasil Survey Kepuasan Mitra Kerja tingkat Resiko terhadap pengawasan yang mengintegrasikan gender dalam perencanaan pembangunan.		
CAPAIAN PROGRAM	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan terhadap lembaga pemerintah daerah yang dapat diselesaikan.		
Hasil yang ada ditujuan	Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi		
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp. 1.458.025.000,-		
RENCANA AKSI	Kegiatan 1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 2. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan daerah	
		Masukan	Rp.291.407.500,-
		Keluaran	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Sosialisasi pengawasan 4E.(effectivity, efficiency, equality,equity) <input type="checkbox"/> Rapat Koordinasi lintas sector dengan lembaga driver PUG (seperti Bag.Hukum, Bappeda,dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) untuk memberikan pendampingan dalam rangka evaluasi PPRG pada OPD <input type="checkbox"/> Melakukan pengaksesan data melalui Aplikasi tentang pelaksanaan tindak lanjut. <input type="checkbox"/> Melakukan sosialisasi, Reviu dan evaluasi monitoring
	Hasil	Menurunnya jumlah temuan OPD yang tidak mengintegrasikan gender dalam perencanaan pembangunan.	



GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Kebijakan/ Program/ Kegiatan yang akan dianalisis	Data Pembukaan Wawasan	Isu Gender	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Kebijakan dan Rencana Ke Depan	Data Dasar (Base-line)	Pengukuran Hasil	
Program : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	1. Jumlah UMKM Di Kabupaten Agam 16.133 UMKM yang terdata.	Akses Kurangnya informasi jumlah dan tempat Pelaku UMKM	-Belum ada pendataan dan identifikasi terkait dengan aspirasi dan kebutuhan dari pelaku UMKM	-Banyaknya anggapan di masyarakat bahwa pekerjaan menyalah, memboradir dan memasak adalah pekerjaan perempuan	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Indikator Gender	
Kegiatan : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2. Pengertian - Mikro Usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 Juta - Kecil Usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih 50 juta sampai 500 juta - Menengah Usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih 500 juta sampai 10 milyar	Partisipasi Jenis pelatihan yang diberikan lebih banyak untuk jenis usaha yang digeluti oleh perempuan	- Pelaksana kegiatan belum sepenuhnya paham mengenai kegiatan yang responsif gender	- Topografi wilayah yang berbeda	- Meningkatkan kemampuan kewirausahaan pelaku usaha pemula	<ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah - Output Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan tahun 2019 - Outcome Meningkatnya SDM Pelaku Usaha 		
Sub Kegiatan : Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kontrol Otoritas kegiatan ini sepenuhnya ada pada penyelenggara kegiatan	- Kurangnya sumber daya yang tersedia untuk pembinaan pada pelaku usaha	- Kurangnya monitoring dan evaluasi terhadap pelaku usaha yang sudah mendapatkan pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi petugas yang melakukan pembinaan - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaku usaha 				
Sasaran : Pelaku usaha (UMKM)	3. Jenis-jenis usaha UMKM di Kab Agam : a. Industri 7.419 UKM b. Dagang dan Jasa 8.714							

UKM	<p>4. Data pelaku usaha yang sudah mendapatkan pelatihan tahun 2017 laki-laki 11 orang, 49 orang perempuan. Tahun 2018 laki-laki 19 orang, 51 orang perempuan. Tahun 2019, laki-laki 6 orang, perempuan 54 orang. Tahun 2020 laki-laki 15 orang, perempuan 65 orang. Tahun 2021 laki-laki 11, perempuan 39 orang.</p> <p>5. Jumlah petugas pembina UMKM di dinas 2 orang (ASN), 2 orang pendamping.</p>

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (PAG/GBS)

NO	ASPEK	URAIAN
1	Program Kegiatan : Sub Kegiatan :	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
2	Indikator kinerja Sub Kegiatan	Jumlah Pelatihan yang dilaksanakan
3	Tujuan kegiatan	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas koperasi dan UKM
4	Kode Rekening Sub Kegiatan	2.17.05.2.01.01
5	Analisa situasi	<p><u>Data Terpilah (diambil dari langkah 2)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah UMKM di Kabupaten Agam 16.133 UKM yang terdata. 2. Pengertian <ul style="list-style-type: none"> - Mikro Usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 Juta - Kecil Usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih 50 juta sampai 500 juta - Menengah Usah produktif yang memiliki kekayaan bersih 500 juta sampai 10 miliar 3. Jenis-jenis usaha UMKM di Kab Agam : <ol style="list-style-type: none"> a. Industri 7.419 UKM b. Dagang dan Jasa 8.714 UKM 4. Data pelaku usaha yang sudah mendapatkan pelatihan Kewirausahaan tahun 2017 laki-laki 11 orang, 49 orang perempuan. Tahun 2018 laki-laki 19 orang, 51 orang perempuan. Tahun 2019, laki-laki 5 orang, perempuan 55 orang. Tahun 2020 laki-laki 15 orang, perempuan 65 orang. Tahun 2021 laki-laki 11 orang, perempuan 39 orang. 5. Jumlah petugas pembina UMKM di dinas 2 orang (ASN), 2 orang pendamping <p><u>Faktor Kesenjangan (diambil dari langkah 3)</u></p> <p><u>Akses</u> Kurangnya informasi jumlah dan tempat Pelaku UMKM</p> <p><u>Partisipasi</u> Jenis pelatihan yang diberikan lebih banyak untuk jenis usaha yang digeluti oleh perempuan</p> <p><u>Kontrol</u> Otoritas kegiatan ini sepenuhnya ada pada penyelenggara kegiatan</p> <p><u>Manfaat</u></p> <p><u>Faktor Internal dan Eksternal (dipisah)</u></p> <p><u>Faktor Internal</u> <ul style="list-style-type: none"> - Belum ada pendataan dan identifikasi terkait dengan aspirasi dan kebutuhan dari pelaku UMKM - Pelaksana kegiatan belum sepenuhnya paham mengenai kegiatan yang responsif </p>

		<p>gender</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya sumber daya yang tersedia untuk pembinaan pada pelaku usaha - Kurangnya monitoring dan evaluasi terhadap pelaku usaha yang sudah mendapatkan pelatihan <p>Faktor Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Banyaknya anggapan di masyarakat bahwa pekerjaan menyulam, membordir dan memasak adalah pekerjaan perempuan - Topografi wilayah yang berbeda 												
6	Rencana Aksi	<p>Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan</p> <p>- Melakukan pendataan dan identifikasi pelaku usaha</p> <p>- Memberikan informasi kepada pelaksana kegiatan perlunya pelaksanaan kegiatan yang responsif gender</p> <p>- Meningkatkan kompetensi petugas yang melakukan pembinaan</p> <p>- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaku usaha</p>												
		<table border="1"> <tr> <td>Tujuan</td><td>Meningkatnya SDM Pelaku Usaha</td></tr> <tr> <td>Aktivitas 1</td><td>Melakukan pendataan dan identifikasi pelaku usaha</td></tr> <tr> <td>Aktivitas 2</td><td>Memberikan informasi kepada pelaksana kegiatan perlunya pelaksanaan kegiatan yang responsif gender</td></tr> <tr> <td>Aktivitas 3</td><td>Meningkatkan kompetensi petugas yang melakukan pembinaan</td></tr> <tr> <td>Aktivitas 4</td><td>Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaku usaha</td></tr> <tr> <td>Output Kegiatan</td><td>Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan</td></tr> </table>	Tujuan	Meningkatnya SDM Pelaku Usaha	Aktivitas 1	Melakukan pendataan dan identifikasi pelaku usaha	Aktivitas 2	Memberikan informasi kepada pelaksana kegiatan perlunya pelaksanaan kegiatan yang responsif gender	Aktivitas 3	Meningkatkan kompetensi petugas yang melakukan pembinaan	Aktivitas 4	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaku usaha	Output Kegiatan	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan
Tujuan	Meningkatnya SDM Pelaku Usaha													
Aktivitas 1	Melakukan pendataan dan identifikasi pelaku usaha													
Aktivitas 2	Memberikan informasi kepada pelaksana kegiatan perlunya pelaksanaan kegiatan yang responsif gender													
Aktivitas 3	Meningkatkan kompetensi petugas yang melakukan pembinaan													
Aktivitas 4	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaku usaha													
Output Kegiatan	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan													
7	Alokasi Anggaran Output Kegiatan	Rp. 390.304.000.												
8	Dampak/hasil Output Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya SDM pelaku UMKM 												

Lubuk Basung, 30 Maret 2021

Plt.Kepala Dinas
Sekretaris,

Ir. AGUSKA DWI FAJRA

Pembina

NIP. 19670306 200312 1 002

FORMAT GETHWAY (GAP) DWS PERKIM

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Pilih Kebijakan/ Program/ Kegiatan yang akan dianalisis	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Ke Depan	Pengukuran Hasil		
		Faktor Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-line)	Indikator Gender
Program Kawasan Permukiman Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Sub Kegiatan : Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tujuan Meningkatnya Rumah Yang Layak Huni	Luas Permukiman Kumuh di Kabupaten Agam dibawah 10 (sepuluh) Ha, Dari 16 Kecamatan yang ada di Kabupaten Agam masih ada terdapat 0,27% Kawasan Permukiman Kumuh Sub Kegiatan : Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tujuan Meningkatnya Rumah Yang Layak Huni	Akses : Jalan ke Lokasi Permukiman kumuh sulit di jangkau Partisipasi : Masyarakat permukiman kurang	Belum validnya data sasaran Tenaga Pengelola masih kurang	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang permukiman bersih dan tertata	Meningkatkan Rumah Layak Huni menjadi Rumah Layak Huni bagi masyarakat	Melaksanakan Sosialisasi/pelatihan tentang Penataan Permukiman yang Sehat, Bersih dan tertata	Rumah Masyarakat yang ada di Kabupaten Agam : 116.068 unit	Input : Meningkatnya Rumah Layak Huni dari 110.949 unit menjadi 111.244 unit
							Jumlah Rumah Tidak Layak Huni : 4.824 unit	Anggarannya : 2.740.000.000,-
							Realisasi : 746 unit (2020)	Out put : Tersedianya Rumah Masyarakat Yang Layak Huni sebanyak 137 unit
							Target Tahun 2022 : 137 unit	Impact : Masyarakat yang Layak Huni sebanyak 137 unit
							Jumlah Rumah Layak Huni : 111.244 unit	Impact : Masyarakat mempunyai Rumah yang sesuai standar
							Jumlah Tenaga Pengelola : 15	

Sasaran : Rumah Layak Huni	Kabupaten Agam : 116.068 unit Jumlah Rumah Layak Huni : 4.824 unit Realisasi : 746 unit Target Tahun 2022 : 137 unit	Masih Adanya Masyarakat yang mempunyai Rumah Tidak Layak Huni 7,2% Masih adanya Kawasan Perumikan Kumuh 0,27%	untuk pembangunan tidak tersedia	Rumah Layak Huni Orang, (Laki-Laki) : 10 Orang, Perempuan : 5 Orang
	Jumlah Rumah Layak Huni : 111.244 unit	Masih Adanya 6,7% Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Agam		
	Jumlah Tenaga Pengelola : 15 Orang, (Laki-Laki) : 10 Orang, Perempuan : 5 Orang			



FORM PERNYATAAN ANGGRAN GENDER (PAG/GBS)

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	ASPEK	URAIAN
1	Program	Program Kawasan Permukiman
2	Kegiatan	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
3	Sub Kegiatan	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
2	Indikator kinerja kegiatan	Tersedianya Rumah Masyarakat Yang Layak Huni sebanyak 137 unit
3	Tujuan kegiatan	Meningkatnya Rumah Yang Layak Huni
4	Kode Rekening Kegiatan	5.1.06.01.01.0001
5	Analisa situasi	<p>Data Pembuka Wawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luas Permukiman Kumuh di Kabupaten Agam dibawah 10 (sepuluh) Ha, Dari 16 Kecamatan yang ada di Kabupaten Agam masih ada terdapat 0,27% Kawasan Permukiman Kumuh 2. Jumlah Rumah Masyarakat di Kabupaten Agam : 116.068 unit, Rumah Layak Huni 111.244 unit, Rumah Tidak Layak Huni : 4.824 unit, Realisasi 746 unit, Target 2022 : 137 Unit, Masih adanya Rumah yang Tidak Layak Huni 3. Jumlah Tenaga Pengelola : 15 Orang, 10 Orang Laki-Laki, 5 Orang Perempuan, Ketidaksetaraan gender dalam mengelola Rumah Tidak Layak Huni disebabkan, karena kurangnya pemahaman persoalan gender bagi kebijakan khususnya terhadap kebutuhan tenaga pengelola.
6	Rencana Aksi (diambil dari Langkah 7 analisis GAP)	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan Sosialisasi/pelatihan tentang Penataan Permukiman yang Sehat, Bersih dan tertata • Membuat Data Terpisah dari Kawasan Permukiman Kumuh • Meningkatkan kompetensi dan jumlah <p>Tujuan :</p> <p>❖ Meningkatnya Rumah Yang Layak Huni</p> <p style="color: red;">Aktivitas 1 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan Sosialisasi/pelatihan tentang Penataan Permukiman yang Sehat, Bersih dan tertata <p style="color: red;">Aktivitas 2 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membuat Data Terpisah dari Kawasan Permukiman Kumuh

		<p>tenaga pengelola</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membangun Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat • Penyelesaian Tanah masyarakat untuk pembangunan Rumah Layak Huni 	<p>Aktivitas 3 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kompetensi dan jumlah tenaga pengelola <p>Aktivitas 4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membangun Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat <p>Aktivitas 5 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian Tanah masyarakat untuk pembangunan Rumah Layak Huni
7	Alokasi Anggaran		Rp. 2.740.000.000,-
8	Dampak/Hasil Output Kegiatan		Tersedianya Rumah Masyarakat Yang Layak Huni sebanyak 137 unit



FORMAT GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Pilih Kebijakan/ Program / Kegiatan yang akan dianalisis	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base- line)	Pengukuran Hasil Indikator Gender
Program : PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Kegiatan: Pengembangan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	- Kelompok Tani di Kabupaten Agam berjumlah 2.053 kelompok, dan 1.338 kelompok yang tergabung kedalam Gapoktan. - Jumlah anggota kelompok tani Kab. Agam secara keseluruhan 30,118 orang dengan jumlah anggota laki-laki 15,919 orang atau 54%, dan 13,988 orang anggota perempuan atau 46%. - Rata-rata jumlah anggota dalam 1 kelompok tani berjumlah 14 orang, dengan komposisi terdapat 6 orang perempuan dan 8 orang laki-laki. - Jumlah kelompok Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) di Kabupaten Agam sebanyak 46 kelompok. - Jumlah Alat Mesin Pertanian yang dikelola UPJA di Kabupaten Agam berjumlah 912 unit.	• Ada dominansi laki-laki dalam Pengelolaan Alsintan sehingga akses perempuan dalam fasilitasi dan pelayanan Alsintan belum optimal. • Dalam peran pertemuan kelompok dominansi rata-rata kehadiran perempuan dibandingkan laki-laki sebesar 70% : 30 %, sedangkan dalam praktik teknologi Alsintan peran perempuan dibanding laki-laki 30% : 70 %.	- Pembagian peran yang sudah dikonstruksikan secara sosial dan kultural mengakibatkan per penggunaan teknologi terutama Alsintan pada praktiknya didominasi laki-laki. - Dalam pengambilan Keputusan akan kebijakan pertanian perempuan belum diberikan kesempatan dan wewenang yang besar misalnya : dalam penentuan jadwal tanam, penentuan jenis tanaman, pembelian bibit serta pupuk, kebijakan pemasaran serta kebijakan kelembagaan kelompok tani, dll	- Ada anggapan masyarakat bahwa perempuan tidak mampu dalam penggunaan teknologi serta kemampuan fisik dalam penggunaan Alsintan. - Belum optimalnya penyuluhan terkait peran perempuan dalam akses Alsintan.	- Meningkatkan perempuan dalam : 1. Penggunaan teknologi secara umum. 2. Penggunaan teknologi pertanian terutama dalam aktivitas UPJA dan penggunaan Alsintan.	- Meningkatkan/ optimalkasasi peran perempuan dalam : 1. Penggunaan teknologi secara umum. 2. Penggunaan teknologi pertanian terutama dalam aktivitas UPJA dan penggunaan Alsintan.	- Kelompok Tani di Kabupaten Agam berjumlah 2.053 kelompok, dan 1.338 kelompok yang tergabung kedalam Gapoktan. - Jumlah anggota kelompok tani Kab. Agam secara keseluruhan 30,118 orang dengan jumlah anggota laki-laki 15,919 orang atau 54%, dan 13,988 orang anggota perempuan atau 46%.	Out put 1.: 1. Terlaksananya pembinaan pengujian kelembagaan UPJA. 2. Terlaksananya pembinaan kelompok tani. 3. Terlaksananya operasiional Alsintan Out come : 1. Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian

- Dari 46 kelompok UPJA, 100 % pengurus kelompoknya adalah laki-laki. - Menurut Bernadt et.al (1998), mengemukakan bahwa terjadi disparitas pembagian kerja pada usaha tani ladang antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki menyumbang sebesar 458 jam (47,32%) sedangkan perempuan sebesar 510 jam (52,68%).							



FORM PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (PAG/GBS)

NO	ASPEK	URAIAN	
1	Program : Kegiatan : Sub Kegiatan :	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pengembangan Prasarana Pertanian Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	
2	Indikator kinerja kegiatan	1. Tersedianya Alsintan bagi kelompok tani 2. Terlaksananya pembinaan Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA)	
3	Tujuan kegiatan	Terwujudnya peningkatan sarana prasarana teknologi pertanian/perkebunan dalam upaya peningkatan produksi hasil pertanian guna meningkatnya serta optimalisasi peran perempuan dalam : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguasaan teknologi secara umum 2. Penguasaan teknologi pertanian khususnya aktifitas UPJA dan penggunaan Alsintan 3. Pengelolaan kelembagaan Kelompok Petani. 4. Pengambilan keputusan dan kebijakan pertanian misalnya : dalam penentuan jadwal tanam, penentuan jenis tanaman, pembelian bibit serta pupuk, kebijakan pemasaran serta kebijakan kelembagaan kelompok tani, dll 	
4	Kode Rekening Kegiatan	3.27.03.2.01.03	
5	Analisa situasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelompok Tani di Kabupaten Agam berjumlah 2.053 kelompok, dan 1,338 kelompok yang tergabung kedalam Gapoktan. 2. Jumlah anggota kelompok tani Kab. Agam secara keseluruhan 30,118 orang dengan jumlah anggota laki-laki 15,919 orang atau 54%, dan 13,988 orang anggota perempuan atau 46%. 3. Rata-rata jumlah anggota dalam 1 kelompok tani berjumlah 14 orang, dengan komposisi terdapat 6 orang anggota perempuan dan 8 orang laki-laki. 4. Jumlah kelompok Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) di Kabupaten Agam sebanyak 46 kelompok. 5. Jumlah Alat Mesin Pertanian yang dikelola UPJA di Kabupaten Agam berjumlah 912 unit. 6. Dari 46 kelompok UPJA , 100 % pengurus kelompoknya adalah laki-laki. 7. Penerimaan penghasilan laki-laki dari sektor pengolahan tanah lebih besar dari perempuan. 8. Perempuan juga mempunyai akses untuk fasilitasi pengelolaan UPJA dan penggunaan Alsintan 9. Ada anggapan bahwa hanya laki-laki yang mampu dalam penguasaan teknologi serta memiliki kemampuan fisik dalam penggunaan sarana teknologi (alsintan). 10. Perlu optimalisasi penyuluhan. 	
6	Rencana Aksi (diambil dari langkah 7 analisis GAP)	Aktivitas 1	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pelatihan bagi wanita tani dalam pengelolaan Alsintan, penggunaan Alsintan dan sarana teknologi pertanian lainnya. - Memperbanyak diseminasi teknologi pertanian melalui penyuluhan berbagai media langsung, maupun tidak langsung.

		Aktivitas 2	- Melakukan Pembinaan/Penyuluhan berkala Kelompok Wanita Tani dan Perempuan dalam Kelompok Tani tentang Teknologi dan Produk Teknologi
7	Alokasi Anggaran Output Kegiatan		Rp. 750.000.000,-
8	Dampak/hasil Output Kegiatan		1. Terlaksananya pembinaan penguatan kelembagaan UPJA. 2. Terlaksananya pembinaan kelompok tani. 3. Terlaksananya fasilitasi operasional Alsintan

Lubuk Basung, Maret 2021

Kepala Dinas



Ir. ARIEF RESTU, M.Si
NIP. 19660513 199202 1 004